

**KONDISI TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA
MANDIRI DAN DESA TERTINGGAL
(STUDI DI DESA GUNUNG REJO DAN DESA BABAKAN LOA
KABUPATEN PESAWARAN)**

(Skripsi)

Oleh :

HESTIANTINA EFENDI

1846021006



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

KONDISI TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA MANDIRI DAN DESA TERTINGGAL (STUDI DI DESA GUNUNG REJO DAN DESA BABAKAN LOA KABUPATEN PESAWARAN)

Oleh

HESTIANTINA EFENDI

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 1 pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan sehingga mampu mensejahterakan masyarakat desa. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisa kondisi tingkat kesejahteraan antara desa mandiri dan desa tertinggal. Metode dan jenis penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa *Participant Observation*, *Indepth Interview* dan Dokumentasi yang akan diolah dengan cara *Editing* dan Interpretasi Data. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan antara Desa Tertinggal yaitu Desa Babakan Loa dan Desa Mandiri yaitu Desa Gunung Rejo sebagai berikut: tingkat kesejahteraan masyarakat antara desa mandiri dan desa tertinggal di Kabupaten Pesawaran berbeda disebabkan adanya indikator yang mempengaruhinya yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pendapatan, kepemilikan rumah, tingkat pengeluaran, rasa aman dan akses informasi. Berdasarkan catatan hasil penelitian tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa desa mandiri yaitu Desa Gunung Rejo dalam keadaan sangat baik, sedangkan bagi desa tertinggal yaitu Desa Babakan Loa dalam keadaan sangat kurang.

Kata Kunci: Kesejahteraan, Masyarakat Desa, Mandiri dan Tertinggal

ABSTRACT

CONDITION OF THE LEVEL OF COMMUNITY WELFARE IN INDEPENDENT VILLAGE AND UNDERDEVELOPED VILLAGE (STUDY IN GUNUNG REJO VILLAGE AND BABAKAN LOA VILLAGE, PESAWARAN REGENCY)

By

HESTIANTINA EFENDI

This research is motivated by Law Number 6 of 2014 Article 78 paragraph 1 of village development aims to improve the welfare of rural communities and the quality of human life as well as poverty alleviation through fulfilling basic needs, building village facilities and infrastructure, developing local economic potential and utilizing natural resources. and a sustainable environment so as to be able to prosper rural communities. The purpose of this study is to determine and analyze the condition of the level of welfare between independent villages and disadvantaged villages. The method and type of this research is qualitative. Data collection techniques in this study were in the form of Participant Observation, In-depth Interview and Documentation which would be processed by means of Data Editing and Interpretation. The results of the study indicate that the level of welfare between disadvantaged villages, namely Babakan Loa Village and Mandiri Village, namely Gunung Rejo Village, is as follows: the level of community welfare between independent villages and underdeveloped villages in Pesawaran Regency is different due to indicators that influence it, namely human resources, facilities and infrastructure. , income, home ownership, level of expenditure, sense of security and access to information. Based on the records of the research results, the authors conclude that the independent village, namely Gunung Rejo Village, is in very good condition, while for the underdeveloped village, Babakan Loa Village, it is in very poor condition.

Keywords: Welfare, Village Community. Independent and Left Behind

**KONDISI TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA
MANDIRI DAN DESA TERTINGGAL (STUDI DI DESA GUNUNG REJO
DAN DESA BABAKAN LOA KABUPATEN PESAWARAN)**

Oleh

HESTIANTINA EFENDI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG**

BANDAR LAMPUNG

2022

Judul Skripsi : **KONDISI TINGKAT KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI DESA MANDIRI DAN
DESA TERTINGGAL (Studi di Desa Gunung
Rejo dan Desa Babakan Loa Kabupaten
Pesawaran)**

Nama Mahasiswa : **Hestiantina Efendi**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1846021006

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Budi Harjo, S.Sos., M.IP.

NIP 19680112 199802 1 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.

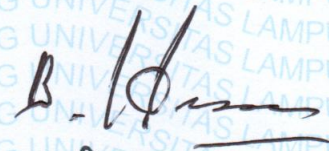
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

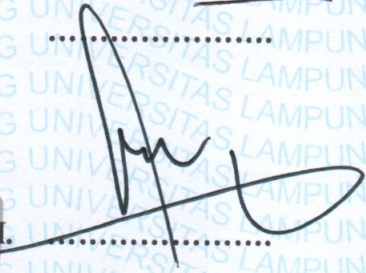
Ketua

: **Budi Harjo, S.Sos., M.IP.**



Penguji

: **Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra Ida Nurhaida, M.Si.

NIP 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **11 April 2022**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 6 April 2022
Yang Membuat Pernyataan



Hestiantina Efendi
NPM. 1846021006

Catatan :
Pernyataan ini diletakan pada halaman setelah Abstrak

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Sukabumi pada tanggal 14 Juni 2000, merupakan putri dari Bapak Arfan Efendi dan Ibu Iwa Setiawati, anak kedua dari dua bersaudara. Penulis memulai jenjang pendidikan di TK Muslimin Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Bukit Kemuning.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bukit Kemuning yang selesai pada Tahun 2015, dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bukit Kemuning yang selesai pada Tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur Paralel dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Selama menjalani perkuliahan penulis pernah ikut dalam organisasi kampus yaitu sebagai anggota biro Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Tahun 2019.

Penulis melaksanakan pengabdian masyarakat pada bulan Januari dan Februari Tahun 2021 melalui kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) selama 40 hari di Desa Bhakti Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. Kemudian pada bulan Agustus Tahun 2021 Penulis melaksanakan PKL (Praktik Kerja Lapangan) melalui program MBKM (Magang Bersertifikat Kampus Merdeka) selama 6 bulan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(QS. Al-Insyirah (94) : 6)

“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya di
ingat”
(Imam Syafi’i)

“Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan”
(Sutan Syahrir)

“Dalam keadaan seberat dan sesulit apapun jangan lupa untuk tetap
bersyukur”
(Hestiantina Efendi)

PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat akal dan kesempatan, menjadi sebaik-baik pelindung, penolong, dan pemberi kemudahan dalam setiap urusan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Teriring sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

Segala ketulusan hati, aku persembahkan karya sederhana ini kepada:

“Ayah dan Ibuku Tercinta”

Terima Kasih yang tak terhingga karena telah sabar dan ikhlas membesarkan, mendidik, mendoakan, dan memberikan kasih sayang yang tiada hentinya. Terima kasih atas segala pengorbanan, motivasi yang menguatkan, memberi semangat disegala keterbatasan dan mendukung setiap langkahku.

Terima kasih untuk seluruh Dosen, Staf dan teman-teman seperjuangan di jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

**Almamater Tercinta Universitas
Lampung**

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Kondisi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mandiri dan Desa Tertinggal (Studi di Desa Gunung Rejo dan Desa Babakan Loa Kabupaten Pesawaran)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan yang penulis miliki.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Penulis mendapat banyak bantuan, bimbingan serta masukan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Budi Harjo, S.Sos.,M.IP. selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih atas bimbingannya selama ini yang sangat detail dalam mengoreksi skripsi penulis agar dapat menjadi skripsi yang lebih baik lagi. Terima kasih atas ilmu, saran dan masukan, semangat dan motivasi yang membangun guna terciptanya skripsi ini, terima kasih juga atas kebaikan dan rasa pengertian yang tinggi terhadap penulis, semoga segala kebaikan yang bapak lakukan

bernilai pahala dari Allah SWT.

4. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono M.H. selaku Dosen Penguji Utama skripsi penulis. Terima kasih atas semua saran dan masukan yang bapak berikan dalam proses perbaikan skripsi yang mengarahkan penulis agar menghasilkan skripsi yang lebih baik, serta terima kasih atas ilmu, nasehat dan pengertiannya, semoga bapak sehat selalu dan kebaikan yang bapak berikan bernilai pahala dari Allah SWT.
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih atas perhatian, motivasi serta bimbingan yang bapak berikan selama menjalani proses perkuliahan yang menuntun penulis agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
6. Seluruh Dosen dan Staf Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Kedua orang tuaku, Bapak Arfan Efendi dan Ibu Iwa Setiawati. Terima Kasih yang tak terhingga karena telah sabar dan ikhlas membesarkan, mendidik, mendoakan, dan memberikan kasih sayang yang tiada hentinya. Terimakasih atas segala pengorbanan, motivasi yang selalu menguatkan, memberi semangat disegala keterbatasan dan selalu mendukung setiap langkahku.
8. Seluruh infoman yang telah membantu dalam proses penelitian terutama Kepala Desa dan Perangkat Desa Gunung Rejo dan Desa Babakan Loa, dan masyarakat yang telah banyak membantu dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan penulis.
9. Teman-teman ku Bella Lesta Nurul Utama dan Sofia Tri Mulya. Terima kasih karena telah menjadi keluarga, terima kasih atas bantuannya, baik suka duka dan canda tawa yang kita lewati bersama selama perkuliahan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan dapat mewujudkan impian kita masing-masing.

10. Abang Reynaldo Maulana, S.IP. Abang Hayatami, S.IP. dan Bella Lesta yang sedang proses S.IP. Terima kasih karena telah mengantar dan menemani saya pada saat saya riset ke Desa Gunung Rejo dan Desa Babakan Loa. Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dan semoga kita dapat mewujudkan impian kita masing - masing.

11. Teman – teman saya Intan Anggrenia dan Panca Priwahyuni. Terima kasih telah menghibur dan menemani disaat saya sedang pusing. Terima kasih atas dukungan, semangat baik suka maupun duka, serta semua bantuan dan kebaikan yang kalian berikan selama ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dan semoga kita dapat mewujudkan impian kita masing – masing.
12. Teman-teman saya Ayu Ulandari, Elisabet Simatupang, Lutfia Hasana. Terima kasih karena selalu ada dan selalu bersedia mendengarkan curhatan saya terutama ketika saya sedang sedih dan galau. Terima kasih atas dukungan, semangat baik suka maupun duka, serta semua bantuan dan kebaikan yang kalian berikan selama ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dan semoga kita dapat mewujudkan impian kita masing – masing.
13. Untuk Helmi Ilham Nugraha, Terima kasih karena sudah membantu mengoreksi kesalahan dari skripsi ini, terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang diberikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikanmu dan semoga kita dapat mewujudkan impian kita masing – masing.
14. Untuk Sry Apriani Ginting, Terima kasih sudah membantu saya dalam hal mengurus berkas, Terima kasih sudah mau direpotkan oleh saya yang banyak tanya tentang berkas berkas yang harus diurus. Semoga Tuhan membalas semua kebaikanmu dan semoga kita bisa sukses dengan impian kita masing-masing.

15. Teman – teman Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2018, Tania, Salsa, Anjas, Diana dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan, dukungan dan doa nya. Semoga kita senantiasa di berikan kesehatan agar dapat mewujudkan cita – cita yang di impikan.
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung. Terima kasih telah menerima kami dengan baik selama pelaksanaan PKL MBKM dan memberikan pengalaman berharga dalam menghadapi dunia kerja.
17. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuanya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas segala jasa dan budi baiknya serta melindungi dan meridhoi kita semua.

Bandar Lampung, 04 April 2022

Hestiantina Efendi

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	13
1.3 Rumusan Masalah.....	14
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kesejahteraan Masyarakat.....	15
2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat.....	15
2.2 Desa.....	18
2.2.1 Potensi Fisik.....	20
2.2.2 Potensi Non Fisik.....	21
2.3 Desa Mandiri.....	21
2.3.1 Pengertian Desa Mandiri.....	21
2.3.2 Hambatan dalam Mewujudkan Desa Mandiri.....	26
2.3.3 Ciri-Ciri Desa Mandiri.....	27
2.3.4 Indikator dalam Kemandirian Desa.....	27
2.3.5 Manfaat Desa Mandiri.....	28
2.3.6 Indeks Kemandirian Desa.....	28
2.3.7 Tantangan Mewujudkan Desa Mandiri.....	29
2.3.8 Strategi dan Langkah Menuju Desa Mandiri.....	30

2.4 Desa Tertinggal	32
2.4.1 Pengertian Desa Tertinggal	32
2.4.2 Kriteria Penentuan Daerah Tertinggal	34
2.5 Kerangka Pikir	37

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian	40
3.2 Fokus Penelitian	41
3.3 Lokasi Penelitian	42
3.4 Jenis dan Sumber Data	42
3.5 Teknik Penentuan Informan	42
3.6 Teknik Pengumpulan Data	44
3.7 Teknik Pengolahan Data	46
3.8 Teknik Analisa Data	47

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Lokasi Penelitian	51
4.1.1 Desa Babakan Loa	51
4.1.1.1 Gambaran Umum Desa	51
4.1.1.2 Demografi	52
4.1.1.3 Keadaan Sosial	53
4.1.1.4 Keadaan Ekonomi	54
4.1.1.5 Jenis Usaha	54
4.1.1.6 Kelembagaan Desa	55
4.1.1.7 Lembaga Kemasyarakatan	55
4.1.1.8 Sarana dan Prasarana	55
4.1.1.9 Pendataan Kepala Desa	56
4.2.2 Desa Gunung Rejo	58
4.2.2.1 Sejarah Desa	58
4.2.2.2 Keadaan Geografis Desa Gunung Rejo	58
4.2.2.3 Keadaan Sosial Desa Gunung Rejo	60
4.2.2.4 Keadaan Ekonomi Desa Gunung Rejo	62

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Mandiri.....	64
5.1.1 Tingkat Kesejahteraan Berdasarkan Indikator Pendidikan	64
5.1.2 Tingkat Kesejahteraan Berdasarkan Kesehatan dan Gizi	66
5.1.3 Sarana Prasarana (Listrik Dan Air)	70
5.1.4 Tingkat Kesejahteraan Berdasarkan Indikator Ketenagakerjaan (Pendapatan)	70
5.1.5 Tingkat Kesejahteraan Berdasarkan Indikator Perumahan Dan Lingkungan (Kepemilikan Rumah)	72
5.1.6 Tingkat Kesejahteraan Berdasarkan Indikator Taraf dan Pola Konsumsi (Pengeluaran)	74
5.1.7 Tingkat Kesejahteraan Berdasarkan Rasa Aman & Informasi	77
1. Kegiatan Siskamling Senin malam hingga minggu malam	80
5.2 Hasil Penelitian Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Tertinggal.....	82
5.2.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat	83
5.2.2 Tingkat Kesehatan Masyarakat	87
5.2.3 Listrik Dan Air	94
5.2.4 Tingkat Pendapatan Masyarakat	100
5.2.5 Komposisi Pengeluaran Masyarakat	105
5.2.6 Tingkat Perumahan Masyarakat	108
5.2.7 Rasa Aman dan Informasi	110
5.3 Pembahasan.....	118
5.3.1 Analisis Kesejahteraan Desa Mandiri	118
5.3.2 Analisis Kesejahteraan Desa Tertinggal	131

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	151
6.2 Saran.....	152

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Tertinggal Desa Babakan Loa Kabupaten Pesawaran	9
1.2 Penelitian Terdahulu	10
3.3 Informan	44
4.4 Daftar Nama – Nama Kepala Desa Babakan Loa	52
4.5 Jenis Usaha	54
4.6 Kelembagaan Desa	55
4.7 Lembaga Kemasyarakatan	55
4.8 Pendataan Kepala Desa Dan Masyarakat Desa.....	56
4.9 Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Desa Gunung Rejo.....	60
5.10 Tingkat Pendidikan Dari Informan Desa Gunung Rejo	66
5.11 Kesejahteraan Berdasarkan Indikator Kesehatan dan Gizi	69
5.12 Kesejahteraan Berdasarkan Indikator Kepemilikan Perumahan.....	74
5.13 Kegiatan Partisipasi Masyarakat Dalam Siskamling.....	78
5.14 Tingkat Pendidikan Masyarakat Babakan Loa 2021	87
5.15 Tingkat Kesehatan Masyarakat Babakan Loa	94
5.16 Jenis Profesi dan Jumlah Pendapatan.....	105
5.17 Pola Konsumsi Tahun 2021	107
5.18 Tingkat Perumahan Masyarakat	109
5.19 Tabel Triangulasi Data	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pikir.....	39
4.2 Peta Desa Gunung Rejo.....	59
4.3 Data Keagamaan Desa Gunung Rejo	60
4.4 Data Tempat Ibadah Desa Gunung Rejo	61
4.5 Data Pendidikan Desa Gunung Rejo	61
4.6 Data Lembaga Pendidikan Desa Gunung Rejo	61
4.7 Data Tenaga Kesehatan Desa Gunung Rejo.....	62
4.8 Data Pertanian Desa Gunung Rejo	62
4.9 Data Peternakan Desa Gunung Rejo.....	63
4.10 Data Perikanan Desa Gunung Rejo	63
5.1 Proses penggalian sumur bor masyarakat Desa Gunung Rejo	122
5.2 Kegiatan Siskamling Desa Gunung Rejo	129

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 angka 1 (Teguh, 2017). Pemerintah sampai saat ini terus melakukan pengukuran atau penilaian dengan menggunakan tolok ukur Indeks Desa Membangun (IDM). IDM merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa (Suseno Aji, 2017). IDM memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. IDM mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa

yaitu tipologi dan modal sosial. IDM mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju; dan Desa Mandiri (Rifki Ar Riza, 2018).

Klasifikasi dalam 5 status Desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Status Desa Tertinggal, misalnya, dijelaskan dalam dua status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal di mana situasi dan kondisi setiap Desa yang ada di dalamnya membutuhkan pendekatan dan intervensi kebijakan yang berbeda. Menangani Desa Sangat Tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya di banding dengan Desa Tertinggal. Indeks Desa Membangun merupakan komposit dari ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. IDM didasarkan pada 3 (tiga) dimensi tersebut dan dikembangkan lebih lanjut dalam 22 Variabel dan 52 indikator. Agustina (2018:23) menyatakan bahwa batasan dan ciri dari ke 5 tingkat perkembangan desa adalah sebagai berikut :

- a. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
- b. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
- c. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
- d. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

- e. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Dari penjelasan tersebut di atas dari tahun ketahun desa yang sangat tertinggal dan desa tertinggal semakin turun dan lepas dari ketertinggalannya. Desa yang maju dari tahun ke tahun semakin bertambah atau meningkat seiring dengan meningkatnya dari desa berkembang, demikian halnya desa yang mandiri juga meningkat. Kondisi ini diharapkan dapat menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai tingkat perkembangan desa dari tiga aspek tersebut; aspek ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan ketahanan lingkungan.

Adisasmita, Teguh (2017:5) berpendapat bahwa desa dibagi menjadi dua jika dilihat dari pemenuhan kebutuhan yang dibatasi oleh pendapatan rumah tangga yang dimiliki, terutama bagi yang berpendapatan rendah. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka persentase pendapatan untuk pangan akan semakin berkurang. Dengan kata lain, apabila terjadi peningkatan tersebut tidak merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut sebaliknya, apabila peningkatan pendapatan rumah tangga dapat merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut tidak sejahtera. Handiyan, Siswanto (2018:45) menyimpulkannya dengan sebutan desa mandiri dan desa tertinggal.

Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Meskipun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang. Desa mandiri adalah desa yang ada kerjasama yang baik, tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Pembangunan desa mandiri meliputi kegiatan-kegiatan rencana pembangunan yang bersifat partisipatif, transparan, akuntabel dan mendetail. (Didik.G.Suharto (2016:12). Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 Pasal 78 ayat 1 Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan. (Ahmad Farouk, M Yasin dkk, 2018:7). Adapun tujuan yang akan dicapai Desa Mandiri yaitu pengembangan desa mandiri berbasis kawasan pedesaan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat pedesaan agar mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.

Adapun desa tertinggal adalah sebagai daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Kurniawan, B. (2018:34) daerah tertinggal adalah daerah Kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk yang relatif tertinggal. Sedangkan menurut Kepmen PDS Nomor 1 tahun 2005 Tentang Strategis Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal didefinisikan sebagai daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayah relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala Nasional. Menurut Borni Kurniawan (2017:71) menyatakan bahwa salah satu karakteristik fungsi dan fasilitas yang dimiliki kawasan perkotaan, serta produktifitas hasil pertanian yang rendah. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dikenal istilah desa tertinggal. Desa tertinggal adalah kawasan perdesaan yang terisolasi dari pusat pertumbuhan/daerah lain akibat tidak memiliki atau kekurangan sarana dan prasarana (infrastruktur) sebagai penghubung, sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kawasan.

Pemilihan lokasi daerah tertinggal bukan ditentukan dari tingkat Propinsi ataupun Pemerintah Pusat, tapi ada hal-hal yang menjadi indikator Pemerintah dalam menetapkan suatu daerah termasuk dalam kategori daerah tertinggal. Menurut Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (2016) penetapan kriteria daerah tertinggal dilakukan

dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pada perhitungan enam kriteria daerah dasar yaitu : (1) perekonomian masyarakat, (2) sumberdaya manusia, (3) prasarana dan sarana (infrastruktur), (4) kemampuan keuangan daerah, (5) aksesibilitas dan karakteristik daerah, dan (6) berdasarkan kabupaten yang berada di daerah perbatasan antar negara dan gugusan pulau-pulau kecil, daerah rawan bencana dan daerah rawan konflik. Menurut Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (2016), secara agregat permasalahan yang dihadapi daerah tertinggal adalah sebagai berikut :

1. Kualitas SDM di daerah tertinggal relatif lebih rendah di bawah rata-rata nasional akibat terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja.
2. Tersebar dan terisolirnya wilayah-wilayah tertinggal akibat keterpencilan dan kelangkaan sarana dan prasarana wilayah.
3. Terbatasnya akses permodalan, pasar, informasi dan teknologi upaya pengembangan ekonomi lokal.
4. Terdapat gangguan keamanan dan bencana yang menyebabkan kondisi daerah tidak kondusif untuk berkembang.
5. Daerahnya perbatasan antar Negara selama ini orientasi pembangunannya bukan sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan lebih menekankan aspek keamanan (*security approach*), sehingga terjadi kesenjangan yang sangat lebar dengan daerah perbatasan Negara tetangga.
6. Komunitas Adat Terpencil (KAT) memiliki akses yang sangat terbatas kepada pelayanan sosial, ekonomi, dan politik serta terisolir dari wilayah disekitarnya.

Menurut Wahyudin Kessa (2015:87) persoalan-persoalan yang dihadapi dalam desa tertinggal antara lain : rendahnya kualitas ekonomi masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi antar penduduk, kesenjangan antar wilayah dan antar desa-kota, rendahnya aksesibilitas wilayah, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, potensi sumberdaya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal, isolasi wilayah, rendahnya kehadiran investor, dan

rendahnya keterkaitan antar sektor, antar wilayah dan antar usaha ekonomi yang mengakibatkan rendahnya kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Badrudin, (2017:149) kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri (Undang-undang No 11 tahun 2009). Dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar seperti rumah yang layak, tercukupinya sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah serta berkualitas atau suatu kondisi dimana suatu individu atau orang atau kelompok mampu memaksimalkan kemampuan pada tingkat batas anggaran tertentu serta kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani (Nur Hidayah:2018).

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cara perwujudan tujuan tersebut yaitu dengan membentuk program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat desa. Bangsa Indonesia yang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan. Oleh karena itu titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan. Pada kenyataannya pembangunan pedesaan masih kurang sehingga masih banyak pedesaan yang tertinggal. Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk, struktural sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting baik secara sosial atau bahkan secara ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang ingin diwujudkan oleh setiap negara. Untuk itu, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

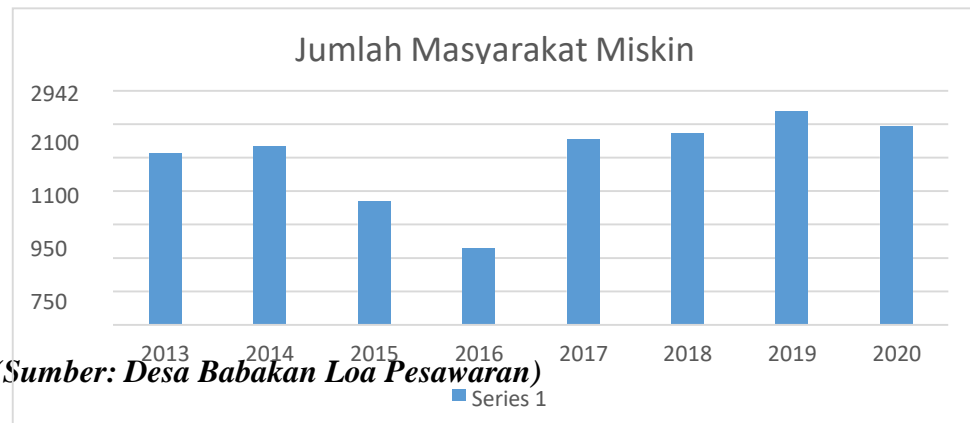
Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya dengan memberikan fasilitas melalui berbagai bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara. Hal ini sangat tergantung kepada perekonomian di pedesaan. Dan konsep peningkatan kesejahteraan masyarakat desa harus dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki. Potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam, sumber daya infrastruktur dan sumber daya struktur. Persoalan kesejahteraan masyarakat desa bermula dari tingkat ekonomi masyarakat desa yang rendah. Strategi pembangunan desa harus dilakukan secara komprehensif dengan berbagai potensi yang dimilikinya. Kualitas sumber daya manusia desa juga perlu untuk ditingkatkan dengan berbagai program dan pendampingan. Tujuan yang diharapkan adalah terciptanya masyarakat desa yang mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berkualitas. Kesejahteraan penduduk sangat diperlukan untuk menciptakan peningkatan kehidupan yang lebih baik dalam ekonomi, sosial, maupun politik. Sebagaimana kita ketahui, masyarakat desa di Indonesia biasanya memiliki ciri agak tertinggal bila dibandingkan dengan perkotaan, baik secara ekonomi maupun dalam hal aspek lainnya, seperti: pembangunan, kualitas kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Banyak pihak yang telah dilibatkan dalam hal pengupayaan perbaikan kesejahteraan masyarakat di sana, namun tetap saja hal tersebut tidak memberi dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat desa tersebut. Terkadang hal itu menjadi dilema tersendiri bagi masyarakat desa. Hal ini cukup beralasan, karena terkadang ada program yang dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat desa, namun hasilnya justru tidak dinikmati oleh masyarakat desa tersebut. Sehingga masyarakat desa jauh dari kesejahteraan dan pembangunan yang merupakan suatu orientasi dalam kegiatan untuk memajukan bangsa, termasuk proses perwujudan cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Salah satu pembangunan desa yang harus dilakukan secara berencana dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan suatu desa dan kesejahteraan

penduduknya, pendapatan yang layak sangat diharapkan oleh seluruh penduduk Indonesia khususnya masyarakat desa dan dapat mengembangkan seluruh potensi desanya agar dapat dimanfaatkan sebab dengan adanya pendapatan yang baik maka kebutuhan hidup mereka dapat terpenuhi dan jauh dari garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2.100 kilo per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Dari penjelasan tersebut maka, kita dapat mengenal istilah desa mandiri dan desa tertinggal. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa yang kurang mampu, mereka memilih untuk membuat usaha mikro atau usaha kecil yang dapat dilakukan agar mampu meningkatkan pendapatannya seperti: bertani, berdagang, perindustrian, pelayanan jasa, dan lain-lain. Mereka bisa disebut sebagai desa tertinggal. Namun untuk melakukan usaha-usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penduduk sangat membutuhkan sumber modal untuk dapat menjalankan usaha atau pekerjaan tersebut.

Indeks Pembangunan Desa disusun berdasarkan lima dimensi, yaitu dimensi pelayanan dasar, dimensi kondisi infrastruktur, dimensi transportasi, dimensi pelayanan umum, dan dimensi penyelenggaraan pemerintah desa. Salah satu contoh desa tertinggal di Kabupaten Pesawaran adalah Desa Babakan Loa. Adapun tabel rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakatnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Tertinggal Desa Babakan Loa Kabupaten Pesawaran



Angka masyarakat miskin masih tinggi dan angka pengangguran di Desa Babakan Loa terungkap masih sangat tinggi jumlahnya, kini telah mencapai lebih dari 2.100 orang. Para pengangguran tersebut, lebih dari 30% atau sekitar 1.400 orang berusia produktif, mereka kini mencari lapangan kerja, pasca selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran di tingkat sekolah atas dan sederajatnya. Jumlah tersebut diambil dari total seluruh warga masyarakat berusia produktif. Dari jumlah warga yang masih belum memperoleh pekerjaan atau menganggur yang mencapai 2.100 itu, rata-rata berusia 15 hingga 55 tahun, mereka mencapai 30 % dari seluruh warga yang pengangguran. Kasus diatas dapat dilihat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat rendah karena dilihat dari tingkat pengangguran yang tinggi merupakan bukti kesejahteraan masyarakat masih rendah karena dari pengangguran dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti, pendidikan, kesehatan, yang nantinya akan berdampak buruk kepada perekonomian masyarakat.

Berdasarkan diagram data tersebut di atas, maka penulis hendak melakukan penelitian terkait kondisi tingkat kesejahteraan antara desa mandiri dan desa tertinggal. Untuk mencapai hasil yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsi, masyarakat desa perlu adanya disiplin yang baik. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Disamping itu disiplin dapat dijadikan alat untuk membangun kepribadian masyarakat

desa sehingga apabila lingkungan kerjanya baik maka akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rina Agustina (2018) mengenai kesejahteraan masyarakat mengemukakan bahwa indikator kesejahteraan masyarakat adalah dari tingkat pendapatan masyarakat, pengeluaran masyarakat, dan tingkat pendidikan masyarakat yaitu melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dengan adanya pembentukan BUMDes bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian desa. Berdasarkan indeks data tersebut di atas yang menjadi permasalahan adalah perbedaan tingkat pelayanan dasar, kondisi Sumber Daya Manusia, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintah desa, hal inilah yang menyebabkan perbedaan tingkat kesejahteraan yang mendasar antara masyarakat desa mandiri dan desa tertinggal. Oleh karena itu penelitian kali ini akan membahas tentang tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Mandiri dan Desa Tertinggal yang ada di Kabupaten Pesawaran.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Jenis	Judul Penelitian
1	Mirza Agus Tri K	2018	Skripsi	Analisis Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Nasional
2	Edwin Setiawan	2016	Skripsi	Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tertinggal
3	Nofiratullah	2018	Skripsi	Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima”.

				Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
4	Restu H, Fitra Riadi, Husnul KH, dan Sugianto	2016	Jurnal	Pengembangan Desa Mandiri dan Desa Tertinggal Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

(Sumber : Data diolah peneliti)

Dalam penelitian ini, hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam kerangka berfikir, disamping untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian dan faktor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan berfikir peneliti. Peneliti mengambil penelitian sebelumnya seperti tersebut pada tabel di atas dengan paparan seperti dibawah ini :

- a. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mirza Agus Tri K yang berjudul Analisis Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Nasional. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa indikator kesejahteraan masyarakat di Desa Pujokerto dari tingkat pendapatan masyarakat, pengeluaran masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesehatan masyarakat sudah dapat dikatakan sejahtera bahkan masuk dalam kategori keluarga sejahtera II. Namun pada kenyataannya Badan Usaha Milik Desa/Kampung (BUMDES Sejahtera) telah berdiri tahun 2013 di Desa Pujokerto belum dapat memaksimalkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Kesejahteraan yang belum merata bagi sebagian masyarakat masih adanya ketimpangan antar masyarakat di Desa Pujokerto yang telah diuraikan.
- b. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Edwin Setiawan yang berjudul Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa tertinggal. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan dibidang ekonomi dan sosial. Keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung, permasalahan yang muncul terkait BUMDes adalah akses masyarakat terhadap air dan akses masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di Bumdes.

- c. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nofiratullah yang berjudul Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi belum dikelola dengan baik, hal ini dikarenakan pengelola masih melakukan pembukuan secara manual dan tidak rutin dalam melakukan penginputan data sehingga peneliti kesulitan dalam mendapatkan data salah satunya data yang sulit di dapat tentang keuangan selama pelaksanaan BUMDes. Kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh para lembaga desa, terutama pengelola BUMDes, dalam komunikasi yang dilakukan masih kurang efektif dan tidak ada jadwal rutin pertemuan/rapat para pengurus Desa dengan para pengelola BUMDes sehingga komunikasi dilakukan saat penting saja. Berdasarkan kajian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kajian yang digunakan dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan apa yang penulis teliti. Persamaan kajian tersebut adalah sama-sama meneliti tentang kesejahteraan, adapun perbedaanya adalah tempat penelitian berada di Kabupaten Pesawaran dan lebih memfokuskan kepada tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Gunung Rejo selaku desa mandiri dan masyarakat Desa Babakan Loa selaku desa tertinggal.
- d. Penelitian yang di lakukan oleh Restu H, Fitra Riadi, Husnul KH, dan Sugianto (2016) “Pengembangan Desa Mandiri dan Desa Tertinggal Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”.

Pembentukan BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Kenyataannya banyak desa yang gagal menjalankan BUMDes dikarenakan kurang siapnya desa dan potensi yang minim dari desa. Tujuan penelitian mengetahui kondisi dan tata kelola BUMDes yang sedang berkembang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDes di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka.

Berdasarkan data yang didapatkan dari observasi awal tersebut di atas dan adanya kewenangan yang dimiliki desa untuk mengurus dan megaturwarga masyarakatnya, maka dengan tujuan agar tercipta kesejahteraan untuk warganya. Maka penulis hendak melakukan penelitian untuk mengetahui kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Mandiri dan di Desa Tertinggal. Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup, pembiayaan atau keuangan merupakan faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah sebagai upaya untuk mensejahteraan masyarakat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahannya yaitu :

- a. Tidak meratanya pelaksanaan dari lima dimensi yaitu dimensi pelayanan dasar, dimensi kondisi infrastruktur, dimensi transportasi, dimensi pelayanan umum, dan dimensi penyelenggaraan pemerintah desa dalam

faktor kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Mandiri dan Desa Tertinggal

- b. Perbedaan tingkat kesejahteraan antar masyarakat desa di Desa Mandiri dan Desa Tertinggal

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Mandiri dan Desa Tertinggal di Kabupaten Pesawaran?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan

- 1) Mengetahui dan menganalisa tingkat kesejahteraan masyarakat desa mandiri dan desa tertinggal di Kabupaten Pesawaran

- b. Manfaat

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi ilmu dikalangan masyarakat desa mandiri maupun desa tertinggal untuk mengetahui landasan landasan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan agar dikembangkan oleh peneliti dengan bahasan serupa yang akan di lakukan selanjutnya.

- 2) Manfaat Praktis

Penelitian ini dilakukan juga sebagai kritik terhadap kebijakan pemerintah yang berkecimpung dalam ranah bahasan penelitian, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan yang sudah berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam prioritas pengembangan tingkat kesejahteraan masyarakat desa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kesejahteraan Masyarakat

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Istilah kesejahteraan bukanlah hal yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Dalam membahas analisis tingkat kesejahteraan, tentu kita harus mengetahui pengertian sejahtera terlebih dahulu. Kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Pengertian sejahtera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Dalam arti lain jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka akan terciptalah kesejahteraan.

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi serta setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi serta tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. A Friedlander, Walter. (2017: 23). Kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan. Kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan. Dan ketiga, memperluas

skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Hal yang paling penting dari kesejahteraan adalah pendapatan, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan. Adisasmita, Rahardjo. (2017:5). Pemenuhan kebutuhan dibatasi oleh pendapatan rumah tangga yang dimiliki, terutama bagi yang berpendapatan rendah. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka persentase pendapatan untuk pangan akan semakin berkurang. Dengan kata lain, apabila terjadi peningkatan tersebut tidak merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut sejahtera. Sebaliknya, apabila peningkatan pendapatan rumah tangga dapat merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut tidak sejahtera. Handayani, Soewarno (2018: 45).

Kesejahteraan pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu:

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial.
2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial. Adi, Isbandi Rukminto (2018:77).
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai sejahtera.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material

dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentaraman hidup.

Ada beberapa faktor lain yang sering kali merupakan faktor yang penting juga dalam menentukan tingkat kesejahteraan, seperti faktor-faktor non-ekonomi yaitu: adat-istiadat, keadaan iklim dan alam sekitar, serta ada/tidaknya kebebasan mengeluarkan pendapat dan bertindak. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan suatu hal yang bersifat subjektif.

Kartasasmitha, Ginandjar (2017: 47) kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban, keamanan, keadilan, ketenteraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan tetapi juga keadilan dalam berbagai dimensi. Kondisi tenteram lebih menggambarkan dimensi sosiologi dan psikologi dalam kehidupan bermasyarakat.

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tentram, baik lahir maupun batin (Sumodiningrat, Gunawan, 2017: 51). Kesejahteraan merupakan sesuatu yang bersifat obyektif, sehingga ukuran kesejahteraan bagi setiap individu atau keluarga berbeda. Tetapi pada prinsipnya kesejahteraan berkaitan erat dengan kebutuhan dasar. Apabila kebutuhan dasar terpenuhi, maka tingkat kesejahteraan individu atau keluarga tersebut dapat terpenuhi. Sedangkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, maka dikatakan bahwa

individu atau keluarga tersebut berada di bawah kemiskinan. Dermawan, Abdurrafafi' Maududi (2016:77). Kesejahteraan masyarakat memperlihatkan bahwa ukuran hasil pembangunan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik meliputi:

1. Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar (makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan);
2. Peningkatan tingkat pendidikan, pendapatan, dan tingkat kehidupan yang lebih baik, serta peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai kemanusiaan dan
3. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa (Suryana, 2016).

Kesejahteraan menurut Sunarti, Euis (2018: 48) mengandung tiga indikator yaitu:

1. Pendidikan, kesehatan, akses pada listrik dan air, penduduk miskin;
2. Keadilan ekonomi mengandung indikator yaitu: pendapatan, kepemilikan rumah, tingkat pengeluaran;
3. Keadilan demokrasi mengandung indikator yaitu: rasa aman dan akses informasi.

2.2 Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Ahmad Farouk, M Yasin dkk, 2017:44).

Desa berasal dari bahasa India "*Swadesi*" yang artinya tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau bisa juga diartikan tanah leluhur yang bisa merujuk pada suatu kesatuan norma hidup dan memiliki batas yang jelas. Beberapa

ahli mengemukakan definisi desa dari sudut pandang geografis, sosiologis, tata kehidupan dan sebagainya. (Kartohadikoesoemo, Soetardjo, 2018:5)

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai petani baik sawah ataupun kebun, sedangkan pada desa pesisir sebagian besar penduduknya mencari penghidupan melalui nelayan. (Leibo, Jefta, 2017:2).

Menurut Bintarto (R.Bintarto, 2017:4) desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.

Desa-desanya di Indonesia memiliki modal sosial yang tinggi. Masyarakat desa memiliki tradisi berdemokrasi di mana keterbukaan, permusyawaratan dan partisipasi menjadi pilar dalam pengambilan keputusan. Budaya musyawarah desa mulai dari komunitas terkecil hingga dalam sebuah arena tertinggi yang melibatkan banyak elemen desa telah menjadi bagian dari model kehidupan desa. Karena itu, sesungguhnya dalam hal budaya demokrasi, desa mendahului sistem demokrasi negara. Kedaulatan desa dari sisi ekonomi mengandung makna kemampuan desa dalam menjaga, mengelola hingga mengoptimalkan fungsi ekonomi aset-aset alam yang berada di dalamnya. Ketika negara terjebak dalam model pengelolaan sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi semata, desa mempelopori pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. (Saparin, Sumber, 2017: 13-15).

Dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga institusi utama berikut ini:

1. Pemerintah desa merupakan unsur pelaksanaan berbagai program pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakatnya.
2. Badan Perwakilan Desa merupakan lembaga legislatif desa yang berfungsi menampung, menyalurkan serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.
3. Lembaga kemasyarakatan desa seperti LKMD, Karang Taruna, PKK dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya merupakan mitra pemerintahan desa dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan untuk mengakomodasikan aspirasi, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan, pelayanan pemerintahan serta dalam rangka menumbuhkan partisipasi dan semangat gotong royong warganya.

Ketiga institusi ini dapat bersinergi untuk mewujudkan, mempercepat, dan memperkuat implementasi otonomi desa dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang secara tegas dan jelas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara garis besar potensi desa dibedakan menjadi dua:

2.2.1.1 Potensi fisik

- a. Tanah mencakup berbagai macam kandungan kekayaan yang terdapat didalamnya;
- b. Air meliputi sumber air dan fungsinya sebagai pendukung kehidupan manusia untuk kebutuhan sehari-hari;
- c. Iklim sangat erat kaitannya dengan temperatur hujan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat desa agraris;
- d. Lingkungan geografis;
- e. Ternak berfungsi sebagai sumber ternak juga dapat menjadi investasi dan sumber pupuk;

- f. Manusia merupakan sumber tenaga dalam proses pengolahan lahan petani, sehingga manusia sebagai potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah untuk mengolah sumber daya alam yang ada.

2.2.1.2 Potensi non fisik

- a. Masyarakat desa cirinya memiliki semangat kegotong royongan yang tinggi sebagai kelangsungan bagi program pembangunan;
- b. Lembaga desa seperti PKK, Karang Taruna;
- c. Lembaga pendidikan seperti SD, SMP, SMA;
- d. Lembaga kesehatan seperti puskesmas;
- e. Lembaga ekonomi seperti BUMDes;
- f. Aparatur dan pamong sebagai sarana pendukung kelancaran dan ketertiban pemerintahan desa. (Purnomo, Joko, 2017: 35).

2.3 Desa Mandiri

2.3.1 Pengertian Desa Mandiri

Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Meskipun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang. Desa mandiri adalah desa yang ada kerjasama yang baik, tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Pembangunan desa mandiri meliputi kegiatan-kegiatan rencana pembangunan yang bersifat partisipatif, transparan, akuntabel dan mendetail. (Didik.G.Suharto (2016:12).

Desa secara universal adalah sebuah aglomerasi (pengumpulan atau pemusatan) permukiman di area pedesaan (*prural*). Sementara untuk mandiri, pengertiannya adalah dapat berdiri sendiri tanpa tergantung dari pihak lain. Jadi yang dimaksud desa mandiri adalah desa yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung dari bantuan pemerintah. (Joeniarto, 2017: 65).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 1 Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan. (Ahmad Farouk, M Yasin dkk, 2018:7).

Menurut Hastowiyono, secara *etimologis*, kemandirian berbeda dengan kesendirian, berbeda pula dengan kedirian. Kesendirian berarti mengurus dirinya sendiri tanpa dukungan pemerintah, dan pemerintah membiarkan desa bekerja sendiri dengan kekuatan lokal, misalnya dengan memanfaatkan swadaya masyarakat. Kedirian sering disebut dengan *autarchy* atau sikap ego desa yang lebih banyak berorientasi ke dalam (*inward looking*), yang tidak mau berinteraksi dengan dunia luar. Sedangkan kemandirian dapat diartikan sebagai kapasitas (kemampuan) untuk melakukan upaya-upaya mencapai kehidupan yang lebih sejahtera dengan mengedepankan optimalisasi potensi dirinya, tanpa menggantungkan dirinya pada pihak lain. (Riyadi, dkk, 2015:6).

Adapun tujuan yang akan dicapai Desa Mandiri yaitu pengembangan desa mandiri berbasis kawasan pedesaan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat pedesaan agar mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.

Kemudian manfaat yang akan dicapai Desa Mandiri (Menteri PPN/Bappenas dan BPS, Indeks Pembangunan Desa 2017: 3) yaitu:

- a. Berkembangnya potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwilayahnya melalui penciptaan lapangan kerja;
- b. Meningkatnya kegiatan usaha ekonomi dan budaya berbasis kearifan lokal di desa;

- c. Meningkatnya kemandirian desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan;
- d. Menurunnya disparitas pembangunan wilayah antara desa dengan kota.

Mengembangkan desa menjadi desa mandiri memang tidaklah mudah, ada beberapa perangkat utama yang perlu dikembangkan dalam mendukung keberhasilan proses tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya partisipasi aktif dari warga/masyarakat yang menjadi modal sosial (*social capital*). Partisipasi masyarakat dalam proses menuju desa mandiri, berarti mengubah paradigma pembangunan desa yang selama ini memosisikan masyarakat selaku objek saja dan kurang terlibat dalam perumusan masalah serta penyusunan kebijakan menjadi bagian dari subjek yang memiliki peran dalam sisi tersebut. Partisipasi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat desa terhadap tujuan yang hendak dicapai, sehingga memunculkan kesadaran terhadap pentingnya program yang dilaksanakan. Dalam tataran lebih jauh, partisipasi merupakan langkah awal guna mengubah budaya yang selama ini menjadi bagian dari akar persoalan ketertinggalan desa. Partisipasi masyarakat secara tidak langsung merupakan refleksi tingkat kepercayaan dalam masyarakat. Karena tingkat kepercayaan merupakan salah satu aspek penting dalam mendorong proses kemajuan sebuah bangsa. Masyarakat dengan tingkat kepercayaan rendah akan mengalami kelambanan dalam mencapai tingkat kemajuan dibandingkan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi.
- b. Kepemimpinan dan inovasi di desa yakni Kepala Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat didalamnya. Kepemimpinan yang efektif akan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat secara maksimal, tidak hanya dalam tatanan kepatuhan, namun lebih dari itu

menimbulkan kesadaran warga terhadap proses menuju desa mandiri. Disamping itu, tentunya memaksimalkan potensi sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Inovasi diperlukan guna menciptakan program maupun mengembangkan program yang telah terlaksana. Mengingat belum semua masyarakat desa menciptakan inovasi, dibutuhkan petugas desa sebagai pemicu sekaligus motor inovasi tersebut.

- c. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kelembagaan pendukung sesuai dengan dimensi kemandirian yang hendak dicapai, seperti koperasi, kelompok tani, lumbung desa, forum kesehatan, kader sehat desa, dan kelompok sadar wisata. Dalam konteks desa mandiri ekonomi, misalnya koperasi mampu berperan sebagai penyedia modal, penyedia sarana dan prasarana pendukung usaha warga. (Jhingan, M. L. 2017:8).

Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun, upaya dalam mewujudkan desa mandiri dapat dijalankan ataupun dilaksanakan dengan beberapa komponen dalam indeks desa membangun yaitu:

- a. Ketahanan Sosial yaitu kemampuan untuk membuat kehidupan yang nyaman dan aman bagi kehidupan sosial masyarakat. Adapun ketahanan sosial tersebut dapat dengan memaksimalkan seperti:
 - 1) Pelayanan kesehatan yang terdiri dari waktu tempuh ke prasarana kesehatan kurang dari 30 menit; tersedia tenaga kesehatan seperti bidan, dokter dan tenaga kesehatan lain; tingkat aktivitas posyandu; serta jaminan kesehatan seperti tingkat kepesertaan BPJS.
 - 2) Akses pendidikan yang terdiri dari akses ke pendidikan SD/MI kurang dari 3 kilometer, akses ke SMP/MTS kurang

dari 6 kilometer, akses ke SMA/SMK kurang dari 6 kilometer, akses ke pengetahuan seperti taman bacaan masyarakat atau perpustakaan desa.

- 3) Modal Sosial yang terdiri dari memiliki kebiasaan bergotong royong di desa, keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak membayar, ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga, terdapat kegiatan kelompok olahraga, memiliki toleransi yang baik antar warga, serta partisipasi masyarakat mengadakan siskamling untuk rasa aman penduduk.
 - 4) Lembaga Kemasyarakatan yang dapat membantu pemerintah desa dalam pembangunan desa yang terdiri dari karang taruna, tim penggerak PKK, RT/RW, Posyandu, LPM, dan sebagainya.
 - 5) Partisipasi masyarakat yaitu dengan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan musrenbangdes; memunculkan kesadaran terhadap pentingnya program yang dilaksanakan dengan ikut dalam pengawasan melaksanakan pembangunan desa, mengikutsertakan masyarakat dalam perumusan masalah serta penyusunan kebijakan menjadi bagian dari subjek yang memiliki peran dalam sisi tersebut.
- b. Ketahanan Ekonomi yang terdiri dari keragaman produksi masyarakat desa; kemudian menyediakan pusat pelayanan perdagangan seperti pasar rakyat; menyediakan lembaga ekonomi seperti BUMDes dari desa serta koperasi; kualitas jalan desa seperti jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan.
- c. Ketahanan Ekologi yang terdiri dari memperbaiki kualitas lingkungan jika ada pencemaran air, tanah, sungai yang terkena limbah; potensi rawan bencana alam seperti banjir.

2.3.2 Hambatan dalam Mewujudkan Desa Mandiri

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia daerah perdesaan ditandai oleh tingkat pendidikan yang relatif rendah, keterampilan yang rendah. Penduduk desa yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif baik banyak bermigrasi ke daerah lainnya, terutama ke daerah perkotaan/industri sehingga memperburuk kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang tinggal di wilayah perdesaan. Salah satu akibat dari lemahnya sumber daya manusia perdesaan ini adalah rendahnya budaya kewirausahaan dan rendahnya jumlah sumber daya yang dimiliki masyarakat perdesaan sehingga pada gilirannya mengakibatkan kapasitas inovasi dan pembelajaran masyarakat juga rendah. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada.

b. Sumber Daya Modal (*investasi*)

Investasi di Indonesia masih rendah padahal modal sangat dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi tersebut, investasi pada hakikatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

- c. Teknologi yang masih rendah
Penggunaan teknologi yang rendah menyebabkan ketidak efisien dan produktivitas yang rendah. Secara umum dapat dikatakan bahwa makin tinggi teknologi yang digunakan maka makin besar kemampuan untuk memperbesar tingkat produksi dan mempercepat pembangunan suatu perekonomian adalah dengan pemakaian teknologi yang modern. (Fitoussi, Joseph E Stligitz, Amartya Sen, dan Jean-Paul, 2017: 9-11)

2.3.3 Ciri-Ciri Desa Mandiri

Secara umum desa sejahtera mandiri dicirikan oleh beberapa hal, diantaranya:

- a. Desa mampu mengurus dirinya sendiri dengan kekuatan yang dimilikinya.
- b. Pemerintah desa mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan yang didukung oleh kemandirian dalam hal perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan.
- c. Sistem pemerintahan desa menjunjung tinggi aspirasi dan partisipasi warga desa, termasuk warga miskin, perempuan, kaum muda, kaum difabel, penyandang masalah sosial dan warga yang termarginalkan lainnya.
- d. Sumber daya pembangunan dikelola secara optimal transparan dan akuntabel untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan sosial seluruh masyarakatnya.

2.3.4 Indikator dalam Kemandirian Desa

Menurut Ahmad Taufik yang dikutip pada buku Menuju Desa yang Mandiri, untuk menuju tatanan sebuah desa yang mandiri, sebuah desa harus melihat beberapa hal di bawah ini:

- a. Memiliki potensi sumber daya alam.
- b. Memiliki potensi sumber daya manusia.

- c. Memiliki potensi prasarana dan sarana yang besar.
- d. Memiliki spesifikasi produk yang menonjol yang didasarkan pada tipologi desa.
- e. Mampu memenuhi kebutuhan di dalam desa dan sebagian yang dapat dijual keluar desa.
- f. Tingkat kemiskinan penduduk desa di bawah rata-rata.
- g. Besarnya tingkat pemberdayaan wanita di dalam kegiatan sosial ekonomi.
- h. Banyaknya jumlah dan jenis kelembagaan.
- i. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.
- j. Adanya tokoh penggerak/inovator dan *eligimatizer* yang memiliki peranan besar dalam masyarakat.
- k. Terdapat peran serta dan kesadaran masyarakat yang besar dalam mengoptimalkan potensi desa yang ada

2.3.5 Manfaat Desa Mandiri

Beberapa manfaat dari desa mandiri antara lain sebagai berikut:

- a. Berkembangnya potensi desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya melalui penciptaan lapangan kerja.
- b. Meningkatnya kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan budaya berbasis kearifan lokal di desa.
- c. Meningkatnya kemandirian desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.
- d. Menurunnya ketimpangan pembangunan wilayah antara desa dengan kota.

2.3.6 Indeks Kemandirian Desa

Indeks Kemandirian Desa digunakan untuk mengukur hasil pembangunan suatu desa. Indeks Kemandirian Desa ini dibentuk dari 3 dimensi, yaitu:

2.3.6.1 Indeks Kemampuan Sendiri (*Input*), yang mencakup:

- a. Variabel Kebutuhan Dasar, meliputi fasilitas perumahan, fasilitas infrastruktur, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kelembagaan sosial, fasilitas pengelolaan lingkungan hidup dan fasilitas keamanan.
- b. Variabel Fasilitas Pemerintah Desa, meliputi fasilitas politik dan tata pemerintah.
- c. Variabel Fasilitas Ekonomi, meliputi fasilitas daya saing ekonomi.

2.3.6.2 Indeks Tanggung Jawab Bersama (*Proses*), yang mencakup:

- a. Variabel Kegiatan kemasyarakatan, meliputi kegiatan perumahan, fasilitas infrastruktur, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kelembagaan sosial, fasilitas pengelolaan lingkungan hidup dan fasilitas keamanan.
- b. Variabel Kegiatan Pemerintah Desa, meliputi kegiatan politik dan tata pemerintah.
- c. Variabel Kegiatan Ekonomi, meliputi kegiatan usaha ekonomi.
- d. Indeks Keberlanjutan (*Outcome*)
- e. Variabel Manfaat Kebutuhan Dasar, meliputi manfaat hasil kegiatan perumahan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kelembagaan sosial, pengelolaan lingkungan hidup dan keamanan.
- f. Variabel Manfaat Pemerintahan Desa, meliputi manfaat hasil kegiatan politik dan tata pemerintah.
- g. Variabel Manfaat Ekonomi, meliputi manfaat dan hasil kegiatan pengembangan ekonomi.

2.3.7 Tantangan Mewujudkan Desa Mandiri

Tantangan implementasi UU Desa dan mewujudkan desa mandiri dapat dilihat dari optimisme dan kekhawatiran para pengamat

terhadap pelaksanaan UU Desa sepanjang tahun 2015 – tahun pertama implementasi UU Nomor. 6/2014. Menurut Borni Kurniawan yang dikutip pada buku Pengembangan Desa, tantangan dalam mewujudkan desa mandiri diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pertama, terkait kekhawatiran yang berpangkal pada persoalan Dana Desa yang dikelola desa. Meski semua masih berjalan, ada kekhawatiran terjadi penyelewengan anggaran publik yang masif di desa-desa. Akar masalahnya ada pada kapasitas pemerintah desa yang masih lemah. Prasangka ini, di satu sisi memang harus diterima sebagai cermin kewaspadaan dan pelecut motivasi, khususnya bagi Pemerintah Desa dan Pendamping Desa
2. Kedua, merubah sikap pasif masyarakat desa dalam urusan pemerintahan ke arah sikap aktif dan kritis. Singkatnya merangsang partisipasi masyarakat desa. Pengawasan terhadap penggunaan dana desa dan APBDesa secara keseluruhan hanya akan efektif apabila dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa. merekalah yang mesti menjadi evaluator utama untuk menjadi penyeimbang kemungkinan terjadinya penyelewengan penggunaan anggaran publik oleh Pemerintah Desa.
3. Ketiga, membangun komunikasi yang baik dengan Pemerintah Desa, sekaligus menjadi jembatan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat desa. Tantangan ini khususnya berlaku bagi pendamping desa.
4. Keempat, perhatian publik atas UU Desa secara umum masih terpaku pada persoalan dana desa. Sementara aspek strategis terkait visi kemandirian desa dan visi desa membangun justru tidak mendapat perhatian yang cukup.

2.3.8 Strategi dan Langkah Menuju Desa Mandiri

Pada saat ini sudah banyak desa-desa yang sudah merintis kemandirian desa tanpa menunggu kehadiran pemerintah supradesa. Menurut Borni Kurniawan yang dikutip pada buku Pengembangan

Desa, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam membangun kemandirian desa, diantaranya:

1. Membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis. Proses pembentukan wadah dan organisasi masyarakat sipil biasanya dipengaruhi oleh faktor eksternal yang mengancam hak publik. Meski demikian, keduanya adalah modal penting bagi desa untuk membangun kedaulatan dan titik awal terciptanya komunitas warga desa yang akan menjadi kekuatan penyeimbang atas munculnya kebijakan publik yang tidak responsif pada kepentingan masyarakat. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa diantaranya: 1) Melakukan *assessment* dan pemetaan kapasitas organisasi kemasyarakatan desa dan 2) menyelenggarakan program atau kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan desa.
2. Memperkuat kapasitas pemerintah dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Selain terhadap organisasi kemasyarakatan, penguatan kapasitas juga harus dilakukan terhadap Pemerintah Desa. seperti tantangan yang dikemukakan diatas, yaitu kapasitas Pemerintah Desa dalam tata kelola keuangan desa. Namun penguatan kapasitas tersebut juga harus dibarengi dengan mengembangkan interaksi yang dinamis antara Pemerintah Desa dengan organisasi masyarakat. Maksud interaksi dinamis adalah bahwa seluruh proses berdesa, urusan publik, dan kebijakan-kebijakan di desa mesti dilakukan dengan melibatkan masyarakat desa.
3. Membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif. Menuju sebuah desa mandiri dan berdaulat tentu membutuhkan sistem perencanaan yang terarah ditopang partisipasi warga yang baik. secara skematik pembelajaran penerapan sistem tersebut sebagai berikut:

4. Melalui Musrenbang desa Pemerintah Desa menemukan visi dan misi kepala desa terpilih dengan aspirasi dan kebutuhan prioritas masyarakat lalu memasukkannya secara konsisten dalam dokumen perencanaan (RPJMD dan RKPD).
5. Pemerintah Desa membahas dan memastikan ide atau usulan program mandiri pangan (pengadaan bibit, dll) masuk dalam dokumen anggaran (RAPBD dan APBD).
6. Pemerintah Desa memastikan pelaksanaan kegiatan belanja anggaran seperti pengadaan bibit, warga menanam, hingga memastikan tanaman yang ditanam benar-benar tumbuh baik
7. Membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif. Saat ini banyak sekali tumbuh inisiatif desa membangun keberdayaan ekonomi lokal. Keberhasilan di bidang ekonomi tersebut tidak lepas dari kemampuan desa membangun perencanaan yang konsisten, partisipatif dan disepakati dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa (RPJMD, RKPD dan APBD)

2.4 Desa Tertinggal

2.4.1 Pengertian Desa Tertinggal

Daerah tertinggal adalah sebagai daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Kurniawan, B. (2018:34). Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk yang relatif tertinggal. Sedangkan menurut Kepmen PDS Nomor 1 tahun 2005 Tentang Strategis Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal didefinisikan sebagai daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayah relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala Nasional. Menurut Borni Kurniawan (2017:71) menyatakan bahwa salah satu karakteristik fungsi dan fasilitas yang dimiliki kawasan perkotaan, serta produktifitas hasil pertanian yang rendah. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka di

kenal istilah desa tertinggal. Desa tertinggal adalah kawasan perdesaan yang terisolasi dari pusat pertumbuhan/daerah lain akibat tidak memiliki atau kekurangan sarana dan prasarana (*infrastruktur*) sebagai penghubung, sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kawasan.

Menurut Bappenas (Nurman, 2016) wilayah tertinggal secara umum dapat dilihat dan ditentukan berdasarkan letak geografisnya yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu wilayah tertinggal di pedalaman dan wilayah tertinggal di pulau-pulau terpencil.

2.4.1.1 Kondisi wilayah tertinggal di pedalaman

- a. Kondisi sumberdaya alam sangat rendah (kesuburan tanahnya yang rendah, rawan longsor, rawan banjir, terbatasnya sumberdaya air, daerah dengan topografi yang terjal, tanah berawa-rawa/gambut.
- b. Sumberdaya alamnya mempunyai potensi, namun daerah tersebut belum berkembang/terbelakang. Kondisi geografis pada umumnya di daerah yang tidak terjangkau, sehingga walaupun lokasinya relatif dekat, namun tidak tersedia akses dari wilayah tersebut ke wilayah pusat pertumbuhan. Penguasaan dan penerapan teknologi yang relatif rendah dikarenakan kurangnya pembinaan dan keterbatasan dukungan prasarana teknologi itu sendiri.
- c. Ketersediaan atau keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, air irigasi, kesehatan, pendidikan dan lainnya menyebabkan wilayah tertinggal tersebut semakin sulit untuk berkembang.
- d. Tingginya kesenjangan ekonomi antar daerah (misalnya antara pantai/pesisir dengan pedalaman). Struktur sosial ekonomi masyarakat terbagi dalam beberapa tingkatan

- misalnya masyarakat tradisional, semi modern, dan masyarakat modern.
- e. Rendahnya akses ke pusat-pusat pertumbuhan lokal misalnya ibukota kecamatan. Biaya transportasi menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan nilai jual komoditi.
 - f. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia, baik aparatur maupun masyarakat.
 - g. Komoditi dan jumlah rumah penduduk belum layak. Sebaran kampung penduduk yang terpencar dan pada daerah dengan topografi berat, menyebabkan daerah tersebut sulit dijangkau.
 - h. Masih belum mengenal uang sebagai alat jual beli barang. Di masyarakat yang sudah mengenal uang, proses pemupukan modal dari masyarakat sendiri belum berlangsung dengan baik.

2.4.1.2 Kondisi wilayah tertinggal di pulau-pulau terpencil

- a. Kondisi masyarakat pulau-pulau terpencil di wilayah terpencil masih sangat marjinal, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak yang mempunyai kepentingan.
- b. Terdapat 88 pulau kecil yang bertitik dasar dan berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga.
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengolahan, khususnya terhadap pulau-pulau yang terpencil sulit dijangkau dan tidak berpenghuni.
- d. Kondisi pulau di perbatasan umumnya pulau-pulau yang sangat kecil sehingga sangat rentan terhadap kerusakan baik oleh alam maupun akibat kegiatan manusia
- e. Adat istiadat, budaya dan agama dan masyarakat pulau-pulau kecil yang spesifik dan pada umumnya bertentangan dengan adat, budaya yang dibawa oleh pendatang/wisatawan, sehingga akan menghambat proses pembaharuan.

2.4.2 Kriteria Penentuan Daerah Tertinggal

Pemilihan lokasi daerah tertinggal bukan ditentukan dari tingkat Propinsi ataupun Pemerintah Pusat, tapi ada hal-hal yang menjadi indikator pemerintah dalam menetapkan suatu daerah termasuk dalam kategori daerah tertinggal. Menurut Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (2016) penetapan kriteria daerah tertinggal dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pada perhitungan enam kriteria daerah dasar yaitu : (1) perekonomian masyarakat, (2) sumberdaya manusia, (3) prasarana dan sarana (*infrastruktur*), (4) kemampuan keuangan daerah, (5) aksesibilitas dan karakteristik daerah, dan (6) berdasarkan Kabupaten yang berada di daerah perbatasan antar Negara dan gugusan pulau-pulau kecil, daerah rawan bencana dan daerah rawan konflik.

Faktor penyebab suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal yaitu antara lain :

- a. Geografis : secara geografis wilayah tertinggal relatif sulit dijangkau akibat letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan. Kepulauan, pesisir dan pantai pulau-pulau terpencil, ataupun karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh perkembangan jaringan, baik transportasi maupun media komunikasi.
- b. Sumberdaya alam : beberapa wilayah tertinggal terjadi akibat rendah/miskinnya potensi sumberdaya alam seperti daerah krisis minus atau lingkungan sekitarnya merupakan wilayah yang dilindungi atau tidak bisa dieksploitasi, sehingga masyarakat sulit mendapatkan mata pencaharian yang memadai.
- c. Sumberdaya manusia : pada umumnya masyarakat di daerah tertinggal mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang sederhana, serta pada umumnya terikat atau masih memegang teguh nilai-nilai tradisonal dan sulit menerima

nilai-nilai baru. Di samping itu, kelembagaan adat pada sebagian masyarakat pedalaman belum berkembang. Dalam kondisi demikian, walaupun daerah tersebut memiliki sumberdaya alam yang potensial namun tidak diolah dengan baik atau dimanfaatkan oleh dan untuk kepentingan pihak tertentu.

- d. Kebijakan pembangunan : suatu wilayah dapat tertinggal karena beberapa faktor kebijakan, seperti keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah, kesalahan prioritas penanganan dan strategi atau pendekatan, tidak diakomodasikannya kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan penanganan pembangunan sehingga selama ini salah sasaran atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Menurut Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (2016), secara *agregat* permasalahan yang dihadapi daerah tertinggal adalah sebagai berikut :

1. Kualitas SDM di daerah tertinggal relatif lebih rendah di bawah rata-rata nasional akibat terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja.
2. Tersebar dan terisolirnya wilayah-wilayah tertinggal akibat keterpencilan dan kelangkaan sarana dan prasarana wilayah.
3. Terbatasnya akses permodalan, pasar, informasi dan teknologi upaya pengembangan ekonomi lokal.
4. Terdapat gangguan keamanan dan bencana yang menyebabkan kondisi daerah tidak kondusif untuk berkembang.
5. Daerahnya perbatasan antar Negara selama ini orientasi pembangunannya bukan sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan lebih menekankan aspek keamanan (*security approach*), sehingga terjadi kesenjangan yang sangat lebar dengan daerah perbatasan Negara tetangga.

6. Komunitas Adat Terpencil (KAT) memiliki akses yang sangat terbatas kepada pelayanan sosial, ekonomi, dan politik serta terisolir dari wilayah disekitarnya.

2.5 Kerangka Pikir

Untuk melihat kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat desa antara Desa Gunung Rejo sebagai Desa Mandiri dan masyarakat Desa Babakan Loa sebagai Desa Tertinggal maka penulis menetapkan kerangka pikir sebagai berikut:

Pertama, menetapkan *grand theory* (teori utama) yang membahas tentang tingkat kesejahteraan dan rencana atau langkah tindakan suatu Pemerintahan Desa untuk mencapai tujuan. Menurut (Fahrudin, 2017) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial diartikan suatu keadaan seseorang dapat mampu memenuhi seluruh kebutuhan serta mampu melakukan hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu pendapatan yang cukup, pendidikan dan kesehatan yang terpenuhi. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran W.J.S Poewodarminto (Adi, 2019) bahwa kesejahteraan merupakan kondisi dimana seseorang dalam keadaan aman, makmur sentosa, selamat dari berbagai segala macam gangguan masalah atau kesukaran dan sebagainya. Gangguan masalah ini meliputi dari berbagai aspek yaitu gangguan kesehatan, gangguan pendidikan, gangguan kerja dan sebagainya. *Kedua*, peneliti melakukan *survey* awal ke lapangan untuk menggali data dan informasi mengenai kesejahteraan masyarakat desa Desa Mandiri dan Desa Tertinggal di Kabupaten Pesawaran. *Ketiga*, peneliti menggali data dari informan dalam hal ini berkaitan dengan judul yang akan penulis teliti. *Keempat*, peneliti melakukan analisis terhadap seluruh data yang diperoleh dengan menggunakan analisis kualitatif. *Kelima*, peneliti memberikan solusi dari fenomena tersebut dan berharap bisa menjadi bahan masukan bagi para peneliti selanjutnya serta instansi terkait.

Setelah menetapkan kerangka fikir di atas selanjutnya penulis mengoperasionalkan dengan indikator-indikator sebagai berikut

Pertama, Sumber Daya Manusia yaitu peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan. *Kedua*, sarana dan prasarana, serta inovasi dan motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan. *Ketiga* kebutuhan terpenuhi dari tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik. *Keempat* peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan. *Kelima*, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa. Menurut (Fahrudin, 2018) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial diartikan suatu keadaan seseorang dapat mampu memenuhi seluruh kebutuhan serta mampu melakukan hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu pendapatan yang cukup, pendidikan dan kesehatan yang terpenuhi.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Mandiri dan masyarakat Desa Tertinggal yang berada di Kabupaten Pesawaran, maka tipe penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipandang cocok karena bersifat alamiah dan menghendaki keutuhan sesuai dengan masalah penelitian ini. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami (sebagai lawannya adalah eksperimen), di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi (gabungan), data yang dihasilkan bersifat deskriptif, dan analisis data bersifat induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Nasution, 2017).

Pada dasarnya, penelitian kualitatif mencermati manusia dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini yang diamati dan diwawancarai adalah objek penelitian yaitu kepala desa dan masyarakat desa dari desa mandiri dan desa tertinggal. Metode kualitatif digunakan agar peneliti dapat meneliti proses kegiatan manusia, dan data yang diperoleh akan lebih lengkap, mendalam, dan dapat lebih dipercaya, sehingga rumusan masalah penelitian akan dapat terjawab, dan tujuan penelitian tercapai secara lebih efektif.

Metode kualitatif akan dapat ditemukan data-data yang bersifat pemahaman mendalam, perasaan, norma, nilai, keyakinan, kebiasaan, sikap mental dan budaya yang dianut seseorang maupun sekelompok orang tentang segala sesuatu.

Melalui pendekatan kualitatif ini diharapkan di peroleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna dari fakta yang relevan. Pendekatan kualitatif pada dasarnya berusaha untuk mendeskripsikan permasalahan secara komprehensif, holistik, integratif, dan mendalam melalui kegiatan mengamati orang dalam lingkungannya dan berinteraksi dengan mereka tentang dunia sekitarnya. Penelitian dilakukan secara wajar, peneliti harus terjun ke lapangan dalam jangka waktu yang cukup lama. Penelitian kualitatif sering disebut dengan istilah penelitian naturalistik, karena peneliti menghendaki kondisi objek yang alami atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan fokus yang alamiah yaitu kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Mandiri dan masyarakat Desa Tertinggal.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berisi pernyataan tentang indikator dan faktor- faktor yang akan diteliti secara lebih detail. Yaitu indikator tingkat kesejahteraan desa berdasarkan tingkat pendidikan, kesehatan, akses pada listrik dan air baik, indikator kesejahteraan desa berdasarkan pendapatan, kepemilikan rumah, tingkat pengeluaran terdata baik, dan indikator kesejahteraan desa berdasarkan rasa aman dan akses informasi. Indikator tingkat kesejahteraan ini sesuai dengan pendapat Fahrudin (2018:87) yang menyatakan bahwa indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan desa diantaranya adalah yaitu, pendapatan, konsumsi atau pengeluaran, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal seperti listrik dan air, pendidikan, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan dan rasa aman serta akses informasi. Rincian aspek yang akan diteliti tersebut berguna memberikan arah dan memperjelas jalinan fenomena yang diteliti. Adapun fokus penelitian terhadap objek penelitian ini adalah kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Mandiri dan masyarakat Desa Tertinggal.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian yaitu kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian di Desa Mandiri Gunung Rejo dan Desa Tertinggal Babakan Loa di Kabupaten Pesawaran ini didasarkan pertimbangan bahwa tempat ini mengalami tingkat kesejahteraan yang berbeda antara masyarakat Desa Mandiri dan masyarakat Desa Tertinggal yaitu Desa Babakan Loa dan belum pernah diadakan penelitian yang serupa khususnya mengenai perbedaan tingkat kesejahteraan antar masyarakat desa.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari sumber pertama, untuk sumber data primer terdiri dari kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Mandiri dan masyarakat Desa Tertinggal. Sumber data tersebut di pilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu informan desa mandiri dan desa tertinggal yang di jadikan sumber data juga tidak seluruhnya tetapi dengan cara pemilihan tertentu. Catatan ini didapatkan dari desa mandiri dan desa tertinggal.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepengumpul data, akan tetapi bisa lewat orang lain atau lewat dokumen. Subjeknya adalah kepala desa, sebagai informan sumber data yang berupa dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen dan perangkat lainnya.

3.5 Teknik Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini difokuskan kepada Kepala Desa ataupun staff dari Desa Mandiri Gunung Rejo dan Desa Tertinggal Babakan Loa di Kabupaten Pesawaran. Penentuan ini dengan menggunakan *Criterion-Based*

Selection (seleksi berdasarkan kriteria) yang sering disebut *purposive sampling*. Dalam hal ini, subjek yang dijadikan sampel penelitian dianggap mengetahui perkembangan dan program yang berada di Desa Mandiri Gunung Rejo dan Desa Tertinggal Babakan Loa di Kabupaten Pesawaran. Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka informasi yang dapat digali dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data tentang sejarah Desa Mandiri Gunung Rejo dan Desa Tertinggal Babakan Loa di Kabupaten Pesawaran, sumber datanya adalah kepala desa.
2. Untuk mendapatkan data tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Mandiri Gunung Rejo dan Desa Tertinggal Babakan Loa di Kabupaten Pesawaran, sumber datanya adalah para pengelola dan masyarakat itu sendiri, yaitu para staff ataupun masyarakat desa dan seluruh masyarakat.

Selanjutnya, untuk memperdalam fokus penelitian di atas, peneliti menggunakan teknik *snow ball* (bola salju) yakni teknik penentuan *sample* dengan jumlah kecil kemudian membesar. Melalui teknik ini dilakukan penggalian informasi sedikit demi sedikit, yang lama kelamaan semakin mendalam. Dengan kata lain, peneliti berusaha menggali data tentang tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Mandiri Gunung Rejo dan masyarakat Desa Tertinggal Babakan Loa di Kabupaten Pesawaran secara tahap demi tahap, yakni dari sumber yang kecil (informan kunci) sampai sumber yang cukup banyak (informan lain) yang telah ditunjuk atau dianggap mengetahui tentang kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Mandiri dan masyarakat Desa Tertinggal. sehingga membantu peneliti memperoleh informasi secara lengkap dan meyakinkan. Adapun nama-nama informan dari Desa Mandiri Gunung Rejo dan Desa Tertinggal Babakan Loa di Kabupaten Pesawaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3 Informan

No	Nama Desa	Nama Informan	Ket
1	Gunung Rejo	Suranto, S.T	Kepala Desa
		Munardi, S.Pd.I	Sekretaris Desa

Tabel Lanjutan 3.3. Informan

		Tomo	Ketua RT
		Waluyo	Masyarakat
		Jumadi	Masyarakat
		Sri Rahayu	Masyarakat
		Paidi	Masyarakat
		Lasiman	Masyarakat
		Aspri	Masyarakat
		Deni	Masyarakat
2	Babakan Loa	Ahmad Rosyid	Kepala Desa
		Kusnadi	Sekretaris Desa
		Purnawan	Kasi Keuangan
		Rusmiyati	Masyarakat
		Agus	Masyarakat
		Karmila	Masyarakat
		Asriyani	Masyarakat
		Nur Diah	Masyarakat
		Herman	Masyarakat
		Rudin dan istri	Masyarakat
		Rusliyan dan Narmiyah	Masyarakat
		Muksin dan Rutmini	Masyarakat

(Sumber : Data diolah oleh peneliti pada tahun 2021)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Pengamatan Berperan Serta (*Participant Observation*)

Pengamatan berperan serta menceritakan kepada peneliti apa yang akan dilakukan oleh orang-orang dalam situasi peneliti memperoleh kesempatan

mengadakan pengamatan. Sering terjadi peneliti lebih menghendaki suatu informasi lebih dari sekedar mengamatinya. Menurut Bogdan seperti dikutip oleh Moloeng mendefinisikan secara tepat pengamatan berperan serta sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek dalam lingkungan subjek, dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan.

Pengamatan berperan serta adalah pengamatan yang dilakukan dengan cara ikut ambil bagian atau melibatkan diri dalam situasi obyek yang diteliti (Mohammad Ali, (2016:91). Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan proses pendidikan dan pengajaran dan program-program yang berkaitan dengan kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Mandiri dan masyarakat Desa Tertinggal.

Metode ini dapat digunakan untuk memahami berbagai aspek tentang kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Mandiri dan Desa Tertinggal secara kualitatif agar memperoleh gambaran yang lebih mendalam, peneliti melakukan observasi dengan melibatkan diri secara aktif pada aktifitas yang dilakukan desa. Dengan demikian bisa mengamati secara langsung aktifitas dan interaksi terkait kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Mandiri dan masyarakat Desa Tertinggal.

2. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*).

Wawancara ini dilengkapi dengan rekaman untuk mengetahui informasi secara lebih detail dan mendalam dari informan sehubungan dengan fokus masalah yang diteliti. Dari wawancara ini diperoleh respon atau opini. Subjek penelitian yang berkaitan dengan kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat desa mandiri dan masyarakat desa tertinggal. Untuk membantu peneliti dalam memfokuskan masalah yang diteliti dibuat pedoman wawancara dan pengamatan.

Pengamatan dan wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menjaga hubungan baik dan suasana santai, sehingga dapat muncul kesempatan

timbulnya respon terbuka dan cukup bagi pengamat untuk memperhatikan dan mengumpulkan data mengenai dimensi dan topik yang tak terduga. Dalam hal ini pengamat membagi wawancara ke dalam dua kategori yaitu wawancara terstruktur dan tak terstruktur. Wawancara terstruktur diperlukan secara khusus bagi informan terpilih, yaitu yang memiliki informasi keahlian yang berkaitan dengan kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat desa mandiri dan masyarakat desa tertinggal..

3. Dokumentasi

Data dalam penelitian naturalistik kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau *human resources* melalui observasi dan wawancara. Akan tetapi ada sumber selain manusia yakni dokumen. Dokumen untuk penelitian menurut Guba dan Lincoln sebagaimana dikutip oleh Alwasilah digunakan karena:

- a. Dokumen merupakan sumber data yang kaya, stabil dan mendorong.
- b. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.
- c. Sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang alamiah sesuai konteks, lahir dan berada dalam konteks.
- d. Mudah ditemukan karena tidak reaktif.
- e. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen dan fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. Dokumen yang dianggap relevan dalam kegiatan ini meliputi; struktur, pengelolaan, modal usaha, strategi pengembangan, data pengurus, program kerja, keadaan masyarakat dan lainnya yang dianggap perlu yang terkait kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Mandiri dan masyarakat Desa Tertinggal.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan Data setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data tersebut.

Teknik pengolahan data menurut (Efendi dkk dalam Singarimbun, 2018: 240) terdiri dari:

1. Editing

Editing adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin kesuksesan hasil penelitian serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan.

2. Interpretasi Data

Pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan peneliti dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran penulisan juga ditentukan agar relevan dengan hasil penelitian

3.8 Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti, serta menyajikan sebagai temuan bagi orang lain (Arif, 2018). Untuk meningkatkan pemahaman tentang analisis data perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan seiring dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian pekerjaan pengumpulan data bagi peneliti ini diikuti dengan pekerjaan menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Oleh karena itu, analisis datanya tidak menginginkan statistik. Hal ini searah dengan Bogdan dan Biklen mengatakan bahwa analisis data meliputi kegiatan pengumpulan data, menata data, membaginya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, disintesis, dicari pola, ditemukan apa yang penting dan apa yang akan dipelajari serta memutuskan apa yang akan dilapor. Strauss menyatakan bahwa penelitian kualitatif mungkin akan menggunakan banyak teknik khusus non matematis (*Qualitative analysis may utilize a variety of specialized nonmathematical techniques*), teknik-teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif yang akan digunakan sudah jelas, dan dapat terkait langsung dengan rumusan masalah yang harus dijawab dan hipotesis yang diajukan (Husna, 2019).

Berdasarkan pernyataan di atas nampak bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif lebih sulit dilakukan daripada analisis data dengan kuantitatif, karena alat-alat analisis data kualitatif belum dapat dirumuskan dengan jelas, Miles dan Huberman menyatakan bahwa Analisis data kualitatif masih dipandang bersifat seni, dan dilakukan secara *intuitif* (*many qualitative researcher still consider analysis as art and stress intuitive approach to it*).

Miles and Huberman selanjutnya memberi petunjuk secara umum langkah-langkah dalam analisis data kualitatif, yaitu melalui proses pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan *conclusion* (simpulan) atau *verification* (verifikasi). Hubungan keempat langkah tersebut bersifat interaktif.

1. Koleksi Data (*Data Collection*)

Tahap awal dari setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dibagi dalam dua kategori: 1) data mengenai subjek, seperti data kegiatan, data strategi pengembangan, data organisasi, data usaha dan permodalan, data laporan, data tata tertib, data

pertanggungjawaban, 2) data mengenai sejarah berdiri, letak geografis, kondisi lingkungan, visi dan misi, struktur organisasi, keadaan sarana dan prasarana. Karena penelitian kualitatif bersifat holistik, pada tahap *grand tour question* peneliti akan menanyakan berbagai hal yang masih bersifat umum. Apa yang dilihat, didengar dan dirasakan peneliti boleh ditanyakan pada orang-orang yang ada di lokasi penelitian. Dengan demikian melalui *grand tour question* ini peneliti akan memperoleh data yang cukup banyak. Makin sering peneliti ke lapangan, jumlah data akan semakin banyak. Pada tahap ini peneliti akan observasi secara langsung dan sumber-sumber lain yang terkait untuk melakukan wawancara dan pengamatan mendalam terhadap berbagai aktivitas yang terkait dengan kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Mandiri dan Desa Tertinggal.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Deskripsi data dari observasi dan wawancara, serta dokumentasi ke berbagai sumber data, akan menghasilkan data yang cukup banyak, dan bervariasi. Reduksi data dalam penelitian ini pada hakikatnya menyederhanakan dan menyusun secara sistematis data tersebut terkait kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Mandiri dan Desa Tertinggal. Data-data tersebut adalah data desa dan program aktivitas proses. Data tersebut akan semakin lama semakin banyak apabila waktu penelitian bertambah. Data-data dari berbagai sumber tersebut ada yang sama, ada yang sejenis, ada yang berbeda, ada yang penting, dan ada pula yang tidak penting.

Dalam tahap reduksi ini, dilakukan pengkategorian dan pengelompokan data yang lebih penting, bermakna dan relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Melalui reduksi data ini, diharapkan gambaran tentang kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Mandiri dan Desa Tertinggal ini menjadi lebih jelas.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Data dari kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Mandiri dan Desa Tertinggal, data penilaian proses *assessment* terhadap perbandingan

kesejahteraan, yang sudah direduksi, setelah data yang banyak itu direduksi dan dikumpulkan secara valid supaya data tersebut mudah difahami baik oleh diri peneliti sendiri maupun oleh orang lain, data tersebut perlu disajikan.

Penyajian data dapat menggunakan grafik, matrik *flow chart*, maupun tabel. Data-data yang telah disajikan tersebut selanjutnya diteliti kembali, baik oleh peneliti sendiri maupun oleh orang lain, apakah sudah mantap dan sesuai dengan harapan atau belum. Kalau belum, peneliti kembali lagi ke lapangan. Adapun alur analisis data yang ditempuh sebagaimana pola pendekatan fenomenologis yang dikembangkan.

4. Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah penarikan/verifikasi kesimpulan. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Lokasi Penelitian

4.1.1 Desa Babakan Loa

4.1.1.1 Gambaran Umum Desa

1) Sejarah Desa

Desa Babakan Loa asal mulanya hutan belantara dengan status tanah marga yang termasuk di dalam wilayah Pemerintahan Desa Pasar Baru bagian Barat Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa, tahun 1957 mulai lah berdatangan penduduk dari Pulau Jawa (Jawa Barat dan Jawa Tengah) melalui transmigrasi swadaya, para penduduk pendatang membuka hutan belantara di wilayah ini untuk di jadikan lahan pertanian. Oleh karena itu sebagian besar suku bahasanya terdiri dari Suku Jawa dan Suku Sunda.

Karena faktor kesuburan tanah untuk di jadikan lahan pertanian di wilayah ini, jumlah penduduk pendatang dari Pulau Jawa meningkat dengan cepat, oleh karena itu pada tahun 1970 di resmikan pembentukan dusun kantong di wilayah Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong bagian Utara di resmikan pembentukan Dusun Kantong yaitu Babakan Loa dan Dusun Cikantor.

Mengingat sangat luasnya Desa Induk Pasar Desa Pasar Baru pada tanggal 01 april 2001 diadakan rapat pembentukan / pemekaran dari desa induk yaitu Utara menjadi Desa Babakan Loa Selatan menjadi Desa Sinar Harapan pada tanggal 27 Juli tahun 2002. Pada tanggal 15 Oktober 2002 Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong resmi di mekarkan menjadi Desa Babakan Loa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 29 Tahun 2002. Pejabat sementara Kepala Desa dijabat oleh Bapak Abdul Rahim selama empat tahun. Tahun 2002 Desa Babakan Loa naik statusnya menjadi Desa Defenitip dan pejabat Kepala Desa masih dijabat oleh Bapak Abdul Rahim dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 dan urutan jabatan Kepala Desa Babakan Loa sebagai berikut :

Tabel 4.4 Daftar Nama – Nama Kepala Desa Babakan Loa

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	2002-2006	ABDUL RAHIM.J	PJS
2	2006-2007	UMED.S.Pd	PJ
3	2007-2013	AHMAD ROSYID	Hasil Pilihan
4	2013-2019	AHMAD ROSYID	Hasil Pilihan
5	2019-2025	AHMAD ROSYID	Hasil Pilihan

(Sumber : Desa Babakan Loa)

4.1.1.2 Demografi

a. Demografi

1) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Babakan Loa terletak diantara :

Sebelah Utara : Desa Gunung Rejo

Sebelah Selatan : Desa Sinar Harapan

Sebelah Barat : Desa Bayas Jaya & Harapan Jaya

Sebelah Timur : Desa Wates Dan Sumber Jaya

2) Luas Wilayah Desa Babakan Loa 2116 Ha

Pemukiman	: 199 ha
Pertanian Sawah	: 21 ha
Perkebunan Rakyat	: 1687 ha
Hutan	: 176 ha
Perkantoran	: 2 ha
Sekolah	: 3,5 ha
Jalan Desa	: 25 KM
Lapangan sepak bola	: 2.2 ha

3) Orbitasi

Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	: 12 KM
Lama jarak tempuh ke ibu kota kec	: 60 Menit
Jarak ke ibu kota kabupetan	: 29 KM
Lama jarak tempuh ke ibu kota kab.	: 2 Jam

4) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Kepala Keluarga	: 658
Laki-laki	: 1313 Orang
Perempuan	: 1529 Orang
	: 2942

4.1.1.3 Keadaan Sosial

Secara sosial keadaan Desa Babakan Loa dilihat dari beberapa aspek yaitu:

a. Tingkat Pendidikan

SD/ MI	: 831 Orang
SLTP/ MTs	: 137 Orang
SLTA/ MA	: 90 Orang
S1/ Diploma	: 6 Orang
Putus Sekolah	: 89 Orang
Buta Huruf	: 176 Orang

b. Lembaga Pendidikan

Gedung TK/PAUD	: 1 Unit
SD/MI	: 3 buah

- c. Keagamaan.
- Islam : 2812 orang
- Katolik : 4 orang
- d. Tempat Ibadah
- Masjid/ Musholla : 16 buah

4.1.1.4 Keadaan Ekonomi

a. Mata Pencaharian

- Petani : 945 orang
- Pedagang : 86 orang
- PNS : 3 orang
- Tukang : 21 orang
- Guru : 13 orang
- Bidan/ Perawat : 1 orang
- Sopir/ Angkutan : 6 orang
- Buruh : 229 orang
- Jasa persewaan : 15 orang
- Swasta : 46 orang

4.1.1.5 Tabel 4.5 Jenis Usaha

PERTANIAN	PETERNAKAN	LAINYA
Kakau	Peternak ayam	Konter HP
Lada	Sapi	Bengkel
Singkong	Kambing	Pengrajin/Tukang
Karet	Bebek	Koprasi
Padi		Pertambangan
Jagung		Buruh Tambang
Kopi		

(Sumber : Desa Babakan Loa)

4.1.1.6 Tabel 4.6. Kelembagaan Desa

a. Pembagian Wilayah

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH RT	KETERANGAN
1	Babakan Loa	3	
2	Talang Baru	2	
3	Talang Bawah	3	
4	Cipicung	2	
5	Telaga Sari	4	
6	Sukawayahna	3	
7	Bumi Ayu	2	

(Sumber : Desa Babakan Loa)

4.1.1.7 Tabel 4.7 Lembaga Kemasyarakatan

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH ANGGOTA	KETERANGAN
	BPD	7 Orang	
	PKK	4 Pokja	
	LPM	5 Orang	

(Sumber : Desa Babakan Loa)

4.1.1.8 Sarana dan Prasarana

- kumputer : 2 unit.
- print : 2 unit.
- pinjer print : 1 unit .
- Proyektor : 1 unit
- Laptop : 2 unit
- Lemari arsip : 2 unit
- kipas angin : 2 unit

4.1.1.9 Tabel 4.8 Pendataan Kepala Desa Dan Masyarakat Desa

KECAMATAN		DESA				NO	NAMA LENGKAP (DENGAN GELAR)	KELAHIRAN			JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN
NO	NAMA	NO	NAMA		TGL			BLN	THN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KEDONDONG	1	BABAKAN LOA	A	KADES	1	AHMAD ROSYID	15	6	1970	L	SLTA
				B	PERANGKAT DESA	2	KUSNADI	02	6	1975	L	SLTA
				C	PERANGKAT DESA	3	PUNAWAN	19	9	1971	L	D3
				D	PERANGKAT DESA	4	SRI HANDAYANI	20	6	1989	P	SLTA
				E	PERANGKAT DESA	5	GILANG ARDIANSYAH	19	2	1997	L	SLTA
				F	PERANGKAT DESA	6	ROSITA	18	7	1989	P	SLTA
				G	PERANGKAT DESA	7	KAMSI	10	8	1970	L	SLTA
				H	PERANGKAT DESA	8	HUSEN	15	8	1973	L	S1
				I	PERANGKAT DESA	9	JUHADI	28	7	1982	L	SLTA
				J	PERANGKAT DESA	10	IMRON	30	9	1961	L	SLTA
				K	PERANGKAT DESA	11	ZAHRI IRAWAN	18	1	1994	L	SLTA
				L	PERANGKAT DESA	12	EKA RAHMAWAN	5	11	1981	L	SLTA
				M	PERANGKAT DESA	13	MUNIR	21	7	1974	L	SLTA
				N	PERANGKAT DESA	14	SANALI	13	3	1989	L	SLTA
				O	PERANGKAT DESA	15	DAHOTO	15	5	1978	L	SLTA

SK PENGANGKATAN		JABATAN	REKAP JUMLAH		NIK	NO HP	KET
NOMOR	TANGGAL		KADES	PERANGKAT			
14	15	16	17	18	19	20	21
395/I.02/HK/2019	16-12-2019	KEPALA DESA	1	14	1809071506700008	085273221217	
01	03-04-2017	SEKRETARIS DESA			1809070206750004	082281993680	
01	03-04-2017	KAUR KEUANGAN			1809071909710001	085377068889	
04	29-07- 2020	KASI PEMERINTAHAN			1809076006890006	082281845874	
01	03-04-2017	KAUR PERENCANAAN			1809071902970004	081213201674	
01	03-04-2017	KASI KESEJAHTERAAN			1809075807840004	082175474474	
01	12/10/2018	KASI PELAYANAN			1809071407680020	085268169115	
01	03-04-2017	KAUR UMUM			1809071508730004	081373041947	
01	03-04-2017	KADUS 1			1809072807820002	082180806511	
01	03-04-2017	KADUS 2			1809073006610003	085383555009	
04	29-07- 2020	KADUS 3			1809071001700002	082269177721	
04	29-07- 2020	KADUS 4			1809070511810003	081263699130	
01	03-04-2017	KADUS 5			1809072107740003	082175474326	
04	29-07- 2020	KADUS 6			1809071704910005	082269611130	
01	03-04-2017	KADUS 7			1809071505780001	082282022189	

Sumber: Desa Babakan Loa

4.2.1 Desa Gunung Rejo

4.2.1.1 Sejarah Desa

Desa Gunung Rejo merupakan desa yang berada di Kec. Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Gunung Rejo awalnya merupakan salah satu pendudukan di wilayah Desa Wates Way Ratai yang terkenal dengan nama Anglo (Nama Afdeling wilayah kerja perkebunan karet Way Ratai), pada tanggal 23 Oktober 1986 Desa Gunung Rejo resmi berdiri dan mempunyai 12 dusun yaitu dusun Kalipasir I, Kalipasir II, Gunung Rejo, Kaliawi, Fajarbulan, Gunungsari, Lebaksari, Tamansari, Totoharjo, Merawan, Sidorejo dan Candipuro. Pada Tahun 2013 Desa Gunung Rejo dimekarkan menjadi 3 desa yaitu Desa Gunung Rejo, Desa Mulyosari dan Desa Poncorejo.

Beberapa Potensi yang dimiliki Desa Gunung Rejo dapat di jadikan sebagai potensi ekonomi desa. Salah satunya BUMDES Tunas Jaya adalah badan usaha milik desa yang cukup maju di Kecamatan Way Ratai, BUMDES Tunas Jaya sendiri memiliki 4 unit usaha yaitu Pamdes, Air Terjun Anglo, Pengembangan Sapi dan Jamu botol.

4.2.1.2 Keadaan Geografis Desa Gunung Rejo

1) Letak Dan Batas Wilayah

Desa Gunung Rejo adalah bagian dari wilayah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Batas Geografis Desa Gunung Rejo yang didapatkan dari Monografi Desa adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Register 19, Desa Babakan Loa
 Sebelah Selatan : Desa Poncorejo
 Sebelah Barat : Desa Mulyosari
 Sebelah Timur : Desa Babakan Loa

Berikut adalah peta Desa Gunung Rejo yang di ambil langsung di Balai Desa Gunung Rejo :



Gambar 4.2. Peta Desa Gunung Rejo

(Sumber : Desa Gunung Rejo)

2) Luas Wilayah Desa Gunung Rejo

Desa Gunung Rejo adalah salah satu desa terluas di Kecamatan Way Ratai dengan luas wilayah mencapai 1.343,41 Ha yang di dominasi oleh lahan perkebunan, berikut adalah pembagian luas wilayah yang berada di Desa Gunung Rejo:

1. Tanah Sawah	:	15,50	ha
2. Tanah Kering	:	531,83	ha
3. Tanah Basah	:	0,00	ha
4. Tanah Perkebunan	:	792,31	ha
5. Fasilitas Umum	:	3,77	ha
6. Tanah Hutan	:	0,00	ha

3) Orbetrasi Wilayah Desa Gunung Rejo

Desa Gunung Rejo terletak jauh di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, Desa Gunung Rejo terletak cukup jauh dari perkotaan. Berikut adalah Orbetrasi Desa Gunung Rejo :

Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	:	7 KM
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	:	20 Menit
Jarak ke ibu kota kabupaten	:	40 KM

Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten : 80 Menit

4) Jumlah Penduduk Desa Gunung Rejo

Desa Gunung Rejo memiliki wilayah yang cukup luas, penduduk asli Desa Gunung Rejo berasal dari Wilayah Jawa dan Desa Gunung Rejo memiliki jumlah penduduk sebagai berikut :

Tabel 4.9. Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Desa Gunung Rejo

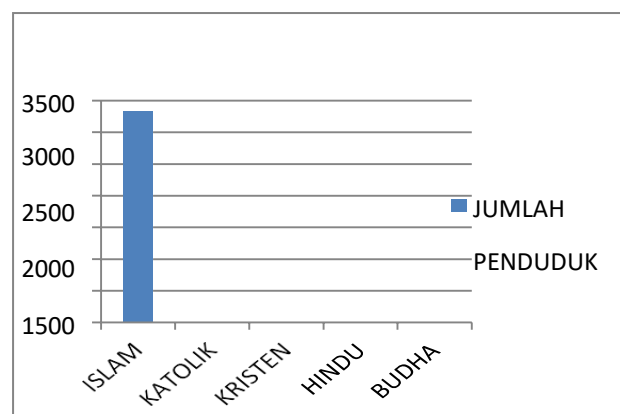
Jumlah Laki-Laki	1740 Orang
Jumlah Perempuan	1588 Orang
Jumlah Total	3328 Orang
Jumlah Kepala Keluarga	873 KK
Kepadatan Penduduk	247, 73 per KM

(Sumber : Desa Gunung Rejo)

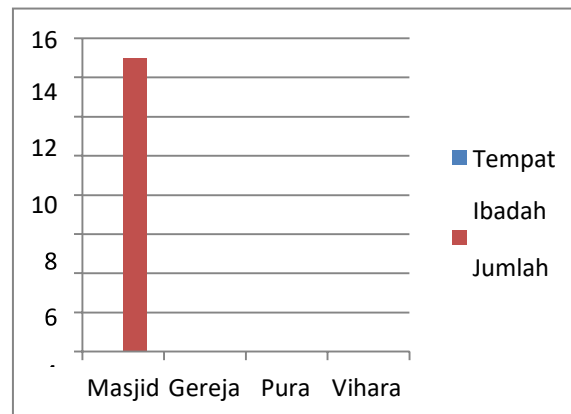
4.2.1.3 Keadaan Sosial Desa Gunung Rejo

Desa Gunung Rejo memiliki sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang produktifitas Desa Gunung Rejo seperti keagamaan, pendidikan, dan kesehatan berikut adalah data sarana dan prasarana yang ada di Desa Gunung Rejo :

1) Keagamaan

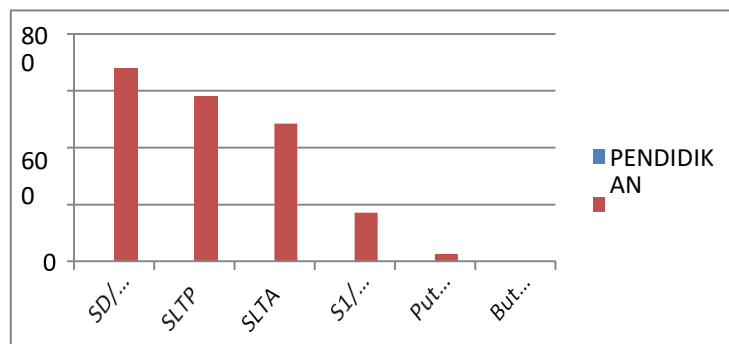


Gambar 4.3. Data Keagamaan Desa Gunung Rejo
(Sumber : Desa Gunung Rejo)

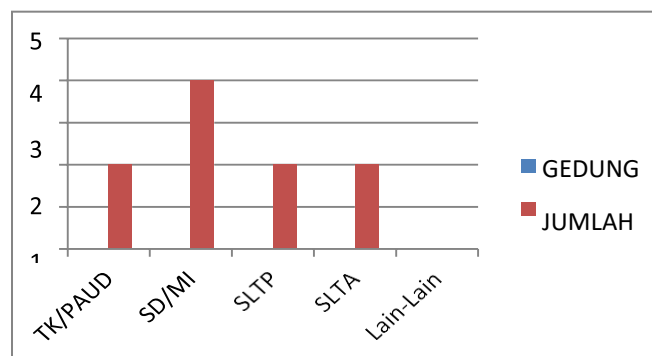


Gambar 4.4. Data Tempat Ibadah Desa Gunung Rejo
(Sumber : Desa Gunung Rejo)

2) Pendidikan

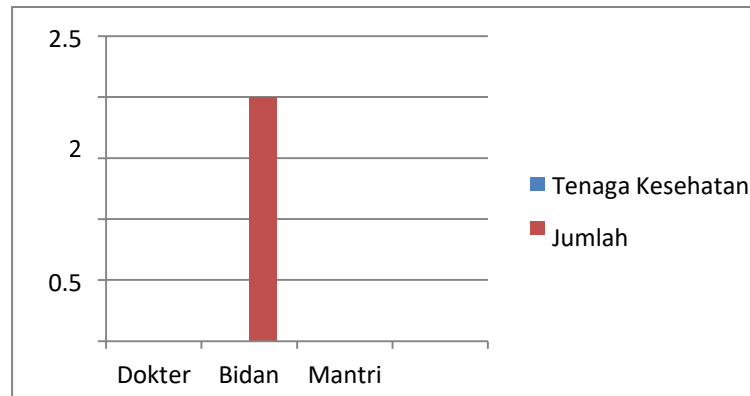


Gambar 4.5. Data Pendidikan Desa Gunung Rejo
(Sumber : Desa Gunung Rejo)



Gambar 4.6. Data Lembaga Pendidikan Desa Gunung Rejo
(Sumber : Desa Gunung Rejo)

3) Kesehatan

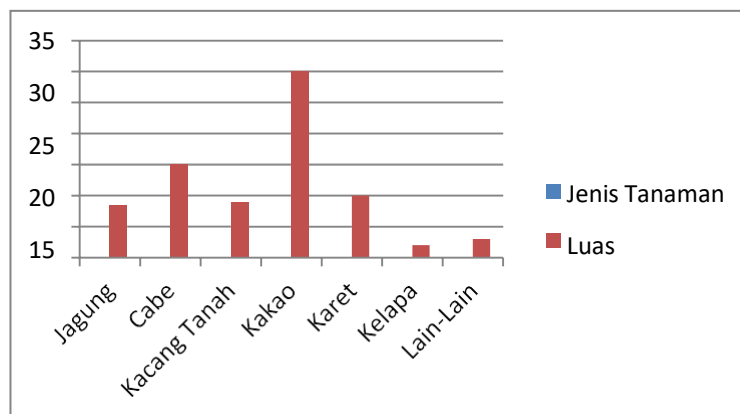


Gambar 4.7. Data Tenaga Kesehatan Desa Gunung Rejo
(Sumber : Desa Gunung Rejo)

4.2.1.4 Keadaan Ekonomi Desa Gunung Rejo

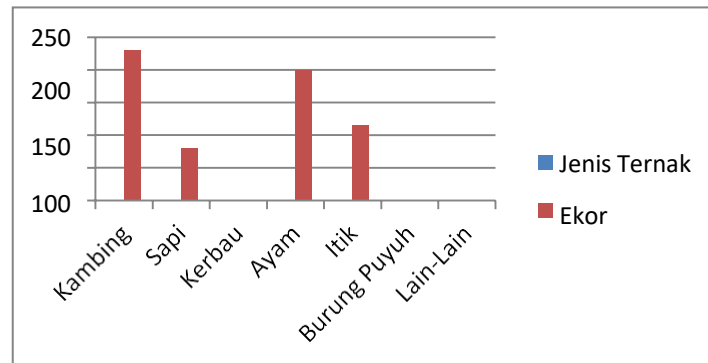
Penduduk Desa Gunung Rejo sebagian besar adalah pekebun dengan sebagian besar lahan di Desa Gunung Rejo digunakan untuk perkebunan. Tidak hanya perkebunan, penduduk Desa Gunung Rejo bermata pencaharian sebagai pedagang. Berikut adalah data perekonomian di Desa Gunung Rejo berdasarkan Monografi Desa Gunung Rejo :

1) Pertanian



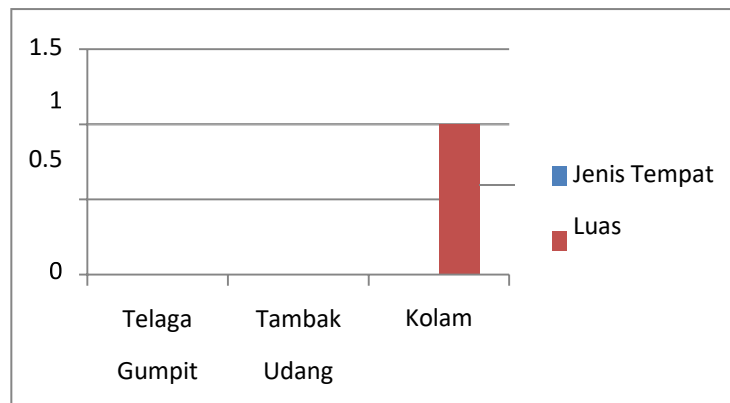
Gambar 4.8. Data Pertanian Desa Gunung Rejo
(Sumber : Desa Gunung Rejo)

2) Peternakan



Gambar 4.9. Data Peternakan Desa Gunung Rejo
(Sumber : Desa Gunung Rejo)

3) Perikanan



Gambar 4.10. Data Perikanan Desa Gunung Rejo
(Sumber : Desa Gunung Rejo)

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kondisi tingkat kesejahteraan antara Desa Tertinggal yaitu Desa Babakan Loa dan Desa Mandiri yaitu Desa Gunung Rejo sebagai berikut:

1. Tingkat kesejahteraan masyarakat antara Desa Mandiri dan Desa Tertinggal di Kabupaten Pesawaran berbeda disebabkan adanya indikator yang mempengaruhinya yaitu SDM, sarana prasarana, pendapatan, kepemilikan rumah, tingkat pengeluaran, rasa aman dan akses informasi.
 - a. Desa Mandiri yaitu Desa Gunung Rejo berdasarkan indikator
 - 1) SDM, menunjukkan bahwa masyarakat Desa Gunung Rejo sebagian besar masyarakat mempunyai kemampuan mengakses pendidikan untuk anaknya ke jenjang pendidikan yang tinggi yaitu S1
 - 2) Sarana prasarana, berkaitan dengan kecukupan sarana dan prasarana listrik dan air yang ada di Desa Gunung Rejo sudah terbilang baik yang mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut dapat peneliti katakan bahwa ketersediaan listrik dan air minum saat musim kemarau teratasi dengan baik, disebabkan masyarakat memiliki sumur bor sendiri.
 - 3) Pendapatan, bahwasanya masyarakat Desa Gunung Rejo dari segi pendapatan sudah terbilang sangat cukup, hal tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat Gunung Rejo adalah pengrajin bambu.

- 4) Kepemilikan rumah, dalam hal kepemilikan rumah masyarakat Desa Gunung Rejo termasuk dalam kategori layak huni dan kondisi lingkungan tempat tinggal bersih dan rapi
 - 5) Tingkat pengeluaran, dalam hal pendapatan masyarakat Desa Gunung Rejo dalam setiap bulannya dapat dikatakan dalam kategori sedang, hal tersebut dikarenakan pendapatan dari hasil kerajinan bambu berbeda-beda karena masih ada masyarakat yang membuat kerajinan bambu dengan alat tradisional dan sebagian ada yang memakai alat bantuan mesin.
 - 6) Rasa aman dan akses informasi dalam keadaan baik, hal tersebut dikarenakan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan rutin siskamling.
- b. Desa Tertinggal yaitu Desa Babakan Loa berdasarkan indikator
- 1) SDM, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Babakan Loa dalam keadaan kurang, rendahnya pendidikan ini menjadi akar permasalahan bahwa kurangnya inisiatif masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan mereka.
 - 2) Sarana prasarana, dalam hal ketersediaan listrik di Desa Babakan Loa masih kurang lantaran keterlambatan distribusi dari pusat, pemasangan listrik juga mengalami keterlambatan dari petugas sehingga banyak dari masyarakat menggunakan sumber tenaga alternatif seperti *genset* dan *solar cell*, sedangkan dalam hal peningkatan air bersih di Desa Babakan Loa, pemerintah desa telah mengadakan program PAMSIMAS dalam peningkatan kualitas air bersih, namun dalam hal ini kurangnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas air membuat program PAMSIMAS tidak berjalan dengan lancar.
 - 3) Pendapatan, pendapatan masyarakat Desa Babakan Loa terbilang sangat kecil hal tersebut dikarenakan masyarakat hanya sebagai buruh tani yang hasilnya tidak banyak, dan faktor penyebab dari semua ini karena pendidikan yang rendah, lapangan pekerjaan yang sedikit serta lingkungan yang tidak mendukung

- 4) Kepemilikan rumah, pada tahun 2019 sampai 2021 mengalami kenaikan yaitu naik sebesar 15%, sedangkan jika dilihat dari tingkat penerangan listrik dari tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami naik sebesar 15%, tetapi belum berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
- 5) Tingkat pengeluaran, jumlah pengeluaran konsumsi makanan masih lebih besar dibandingkan konsumsi perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat masih bergelut untuk memenuhi kebutuhan makanan, sehingga masyarakat Babakan Loa harus mencari pekerjaan tambahan untuk meningkatkan pendapatan.
- 6) Rasa aman dan akses informasi dalam keadaan sangat kurang, Desa Babakan Loa masih terbilang aman di karenakan masyarakat masih aktif dalam melakukan ronda malam. Walaupun masih banyak masyarakat yang kurang aktif dalam kegiatan siskamling, tapi masih terbilang aman, belum ada masalah yang terjadi yang menyangkut keamanan lingkungan.

6.2 Saran

- 6.2.1** Diharapkan kepada perangkat desa dan masyarakat, orang tua khususnya yang berada di Desa Tertinggal agar bersinergi dalam meningkatkan kesejahteraan desa dari berbagai indikator kesejahteraan desa. Terutama untuk pendidikan. Bagi orang tua yang mempunyai anak usia sekolah agar selalu diberikan pemahaman akan pentingnya suatu pendidikan. Motivasi dari orang tua sangat diperlukan untuk merubah cara berfikir anak, bagi orang tua yang mempunyai anak diusia sekolah agar selalu diberikan motivasi baik berupa dorongan moril dan materil agar bisa menempuh pendidikan bahkan sampai perguruan tinggi.
- 6.2.2** Diharapkan kepada pemerintah baik di kecamatan, kabupaten bahkan pemerintah pusat, kiranya perlu memperhatikan secara seksama kondisi masyarakatnya. Adapun keadaan kehidupan

masyarakat ekonomi menengah kebawah, khususnya dalam menetapkan kebijakan, sebaiknya kebijakan tersebut adalah yang tidak menyusahkan masyarakat banyak, disamping itu pemerintah perlu juga memperhatikan keadaan sarana dan prasarana di Desa Tertinggal seperti listrik, air bersih dan sarana dan prasarana lainnya.

- 6.2.3** Hendaknya perangkat desa bekerjasama dengan masyarakat dalam hal perawatan Pamsimas, pembangunan dan memberikan sistem transparansi yang berkesinambungan.
- 6.2.4** Peneliti menyarankan kepada pemerintah desa dan Kabupaten Pesawaran agar mengalokasikan sebagian dana desa lebih maksimal lagi untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat, terutama kepada petani, pedagang dan buruh tani.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A Friedlander, Walter. 1961 . *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Gema Insani Press,
- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Adisasmita, Rahardjo. 2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Penerbit Graha Ilmu
- Ahmad Farouk,M Yasin dkk, 2015, *Anotasi Undang – Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa*, PATTIRO, Jakarta.
- Alwasilah, Chaidar. 2016, *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melaksanakan Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kiblat Buku Utama)
- Anseim I. Strauss, 2015,*Qualitative Analysis/or Social Scientist*, (Cambridge: Cambridge University Press)
- Handayaniingrat, Soewarno. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.
- Jhingan, M. L. 2014. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Joeniarto, 1992, *Perkembangan Pemerintah Lokal*, Bumi Aksara, Jakarta
- Kehati, 2019, *Materi Kursus Inventarisasi flora dan fauna Taman Nasional Meru Betiri*. Malang:
- Leibo, Jeftha, 2011, *Sosiologi Pedesaan*, Andi Offset, Yogyakarta
- Lexy J.Moleong, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)

- Mohammad Ali, 2016, *Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi*, (Bandung: Penerbit Angkasa)
- Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*. (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2012)
- Purnomo, Joko, 2016, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Infest, Yogyakarta.
- R.Bintarto, 2011, *Buku Penuntun Geografi Desa Cet Kedua*, U.P.SPRING, Yogyakarta
- Riyadi, dkk, 2015, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS))
- Suryaningrat Bayu, 2018, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Jakarta: Aksara Baru,
- Suryana. 2013. *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018)
- Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*,(Jakarta Pusat 2015)
- Widjaja, *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Yakin, A. *Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan*. (Akademi Presindo, Jakarta, 2018)

Skripsi/Tesis:

- Didik.G.Suharto, 2016, *membangun Kemandirian Desa* (Perbandingan UU No.5/1979,UU No.22/1999, & UU No.32/2004 serta Perspektif UU No.6/2014), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Widodo, 2017, *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran informasi publik mengenai depok ciber city pada diskominfo kota depok*, universitas esa unggul jakarta

Jurnal :

- Bogdan, Robert C. & Biklen, Sari K. 2016, *Qualitative research for education: An introduction to theory and methods*. (Boston: Allyn and Bacon, Inc.)

- Borni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun*, (Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015)
- David C. William, 2014, *Naturalistic Inquiry Materials*, (Bandung: FPS-IKIP Bandung)
- Fitoussi, Joseph E Stligitz, Amartya Sen, dan Jean-Paul. 2011. *Mengukur Kesejahteraan*. Tangerang Selatan : Marjin Kiri
- Dermawan, Abdurrafafi' Maududi .*Pemberdayaan Ekonomi Kreatif*, Jurnal Studi Gender dan Anak.
- Kartasasmitha, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT Pusaka Cisendo.
- Kurniawan, B. (2015). *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Matthew B. Miles, dan A. Michael Huberman, 2015, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, (Baveriy Hills: Sage Publications)
- Robert C. Bogdan dan Sari Knopp Biklen, 2017 *Qualitative Research for Education:anIntroduction to Theory and Methods*, (Boston: Allyn and Bacon Inc)
- Saparin, Sumber, 2015, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sunarti, Euis. 2005. *Indikator Keluarga Sejahtera Dan Pengembangan, Evaluasi Dan Keberlanjutan*. Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor. ISBN 978-602-866505
- Widyastuti, Astriana. (2012) *Analnsisi hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009*. Economics Development Analysis Journal 1 (1). Semarang. UNNES